

**PENGARUH KEBIJAKAN BUMDES TERHADAP
PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DI KECAMATAN
BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Ekonomi Pembangunan*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Dicky Prasetyo
NPM : 1505180022
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
TAHUN 2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : DICKY PRASETYO
NPM : 1505180022
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : PENGARUH KEBIJAKAN BUMDES TERHADAP
PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DI
KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Penguji II

(HADRIMAN KHAIR, SP, M.Sc)

Pembimbing

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si)

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN SE, M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DICKY PRASETYO
 NPM : 1505180022
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
 Judul Skripsi : PENGARUH KEBIJAKAN BUMDES TERHADAP
 PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DI KECAMATAN
 BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Diketahui/Disetujui

oleh :

Ketua Program Studi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.M., M.Si

IBUKU...

Begitu Besar Pengorbanan Ibu Untukku...

Dari Dulu Sampai Sekarang dan Nanti...

Dari Muda sampai Menua,

Pengorbanan dan Cintanya Tetap sama Besar...

Ibuku Hanya ingin yang terbaik buatku..

Terima Kasih Ibuku Atas segala yang Engkau Berikan..

Kupersembahkan Hasil Kerja kerasku ini hanya untukmu...

Dear : MAMAKKU IRIANA

ABSTRAK

Topik ini diangkat berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengaruh kebijakan BUMDes. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Badan usaha milik desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa terutama yang mengenai bidang usaha atau pun jasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian: (1) Perkembangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Se Kecamatan Beringin, (2) persepsi dari masyarakat desa tentang BUMDes, dan (3) Studi Kelayakkan (*Feasibility Study*) desa Di Kecamatan Beringin . Hasil penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan kebutuhan desa, tetapi banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang BUMDes yang ada di desa Se Kecamatan Beringin. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memperngaruhi kebijakan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi pedesaan di Kecamatan Beringin adalah 4 (empat) faktor yaitu sosialisasi BUMDes, Pembentukan BUMDes, Keterlibatan Masyarakat dengan BUMDes, dan Peran BUMDes. Berdasarkan dari hasil analisa faktor yang ditunjukkan dari nilai *Variance* adalah Sosialisasi BUMDes faktor yang tertinggi dengan nilai 11,87%, sedangkan keterlibatan masyarakat dan peran BUMDes hanya 2,76% dan 1,85%. Hal ini dinyatakan bahwa pemerintah desa lebih banyak melakukan sosialisasi BUMDes dan pembentukan BUMDes tetapi keterlibatan masyarakat dan peran BUMDes di desa belum dilaksanakan secara maksimal.

Kata Kunci : *BUMDes, Penelitian, Masyarakat, Sosialisasi, Desa*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah member kesehatan, kesabaran serta kekuatan dan tak lupa Shalawat bernadakan salam kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: **“Pengaruh Kebijakan BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ”**, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Orang tua yang saya sayangi khususnya buat ayah saya Almarhum Suwandi dan Ibunda saya Iriana beserta saudara kandung saya Dodi Permana dan Andri Perdana dan seluruh keluarga yang telah memberi dukungan dan semangatnya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Roswita Hafni M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS., Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
7. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Fauzan Azizi, Anindhia Anggraini, d Arfansyah Putra, Putri Faradinda hani yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
10. Kepada keluarga besar encu, Yunus Supriadi, Fariz Rionaldi, Shihabuddin Fuady, M.Taufik Lubis, Julyanti Simehate munthe, Anisha pc, Nurwataniah

dan Tasya Dinita yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.

11. Kepada seluruh teman-teman dari Ekonomi Pembangunan stambuk 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh adik-adik saya di ekonomi pembangunan dari stambuk 2016 sampai 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan apabila dalam penulisan terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

Dicky Prasetyo

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	22
1.3 Batasan Masalah.....	23
1.4 Rumusan Masalah	23
1.5 Tujuan Penelitian	24
1.6 Manfaat Penelitian	24
1.6.1 Manfaat Akademik.....	24
1.6.2 Manfaat Non Akademik.....	25
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1 Landasan Teoritis	26
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi	26
A. Teori Klasik.....	29
B. Neoklasik.....	37
C. Keynes	39
D. Konsep Millenium Development Goals (MDG's) to SDG's.....	41
2.1.2 Pendapatan Nasional	44
2.1.3 Pengeluaran Negara.....	49
2.2 Kebijakan Pemerintah Tentang Desentralisasi Fiskal.....	53

A. Kebijakan Dana Desa	55
B. Kebijakan Alokasi Dana Desa	60
C. Kebijakan BUMDes.....	61
2.3 Penelitian Terdahulu	64
2.4 Kerangka Penelitian	66
2.4.1 Bagan Tahapan Penelitian	66
2.4.2 Model Kerangka Konseptual Analisa Faktor	67
BAB 3 Metode Penelitian	68
3.1 Pendekatan Penelitian	68
3.2 Definisi Operasional.....	68
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	69
3.3.1 Tempat Penelitian.....	69
3.3.2 Waktu Penelitian	69
3.4 Jenis dan Sumber Data	70
3.4.1 Jenis Data	70
3.4.2 Sumber Data	70
3.5 Populasi dan Sampel	70
3.5.1 Populasi	70
3.5.2 Sampel	71
3.6 Teknik Pengumpulan Data	72
3.7 Teknik Analisis Data.....	73
3.7.1 Analisis Deskriptif.....	73
3.7.2 Analisis Faktor	73
BAB 4 Hasil Dan Pembahasan.....	81
4.1 Perkembangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di desa Se Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang	81

4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang.....	81
4.1.2	Gambaran Umum Kecamatan Beringin.....	82
4.1.3	Perkembangan Dana Desa di Desa Se Kecamatan Beringin	85
4.1.4	Perkembangan Alokasi Dana Desa di desa Se Kecamatan Beringin.....	88
4.2	Persepsi Masyarakat Desa Tentang BUMDes Yang Ada Di Desa Se Kecamatan Beringin.....	91
4.2.1	Deskriptif Data.....	91
4.2.2	Pembahasan uji validitas dan reabilitas	96
4.2.3	Pembahasan Analisa Faktor	99
4.3	Profil Dan Bentang Alam Dari Desa Yang Ada Di Kecamatan Beringin Dalam Melihat Potensi Ekonomi Desa.....	118
4.3.1	Profil Desa Sidourip.....	118
4.3.2	Bentang Dan Studi Kelayakkan Desa Sidourip	121
4.3.3	Profil Desa Sidodadi Ramunia.....	124
4.3.4	Bentang Dan Studi Kelayakkan Desa Sidodadi Ramunia	125
	BAB 5 Kesimpulan Dan Saran	128
5.1	Kesimpulan	128
5.2	Saran.....	129
5.2.1	Bagi Dunia Penelitian	129
5.2.2	Bagi Desa Di Kecamatan Beringin	129
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar 21 Negara Ekonomi paling kuat didunia tahun 2030 yang di proyeksikan	4
1.2 Perbandingan APBN 2017 dan 2018	13
1.3 Data BUMDes di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang 2018	21
2.1 Penelitian Terdahulu	66
3.1 Definisi Operasional.....	71
4.1 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Di Kecamatan Beringin 2018	86
4.2 Data Jumlah Dana Desa Se Kecamatan Beringin 2015-2018.....	90
4.3 Data Jumlah Alokasi Dana Desa Se Kecamatan Beringin 2015-2018	92
4.4 Jenis Kelamin	95
4.5 Usia Responden.....	96
4.6 Jenis Pekerjaan	97
4.7 Pendidikan.....	98
4.8 Penghasilan perbulan	99
4.9 Uji Validitas	100
4.10 Uji Reliabilitas	102
4.11 KMO and Bartlett's Test	103
4.12 Uji MSA	104
4.13 Uji Communalitas	105
4.14 Total Variance Explained.....	109
4.15 Faktor Loading	110
4.16 Component Matrixa	112
4.17 Komponen Transformasi Matrik.....	114
4.18 Hasil Penamaan Faktor	115
4.19 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Sidourip.....	118

4.20 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Sidodadi Ramunia.....	123
---	-----

DAFTAR GAMBAR

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 2010-2017	5
1.2 Diagram Batang Urbanisasi Desa-Kota	8
1.3 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.....	16
2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	54
2.2 Regulasi BUMDes	65
2.3 Bagan Alur Penelitian	68
2.4 Bagan Konseptual	69
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Deli Serdang.....	85
4.2 Peta Wilayah Kecamatan Beringin	86
4.3 Jenis Kelamin	95
4.4 Usia Responden.....	96
4.5 Jenis Pekerjaan	97
4.6 Pendidikan.....	98
4.7 Penghasilan perbulan	99
4.8 Jenis Pekerjaan	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah telah dirumuskan dalam GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara yang telah diganti dengan Propenas (Program Pembangunan Nasional) yang berlandaskan UU No.25 tahun 2000, ideologi Pancasila dan konstusional UUD 1945 tentang pembangunan nasional akan berkaitan secara langsung dengan proses pembangunan ekonomi.

Realita pembangunan ekonomi Indonesia, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka posisinya Indonesia digolongkan sebagai negara berkembang (*development country atau DCs*). Sebagai negara berkembang, Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki tingkat kemakmuran yang masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, bila melihat secara umum, potensi sumber alam negeri ini yang meliputi bidang agraris dan maritim Indonesia boleh dikatakan sebagai negeri yang kaya raya. Meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi

dan pendapatan per kapita masih jauh dibawah negara-negara maju. Indonesia juga banyak memiliki potensi ekonomi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Beberapa negara tujuan tersebut kadang-kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam Deininger & Pedro, (2000).

Pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional; serta percepatan pertumbuhan pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya, pembangunan haruslah mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sistem itu dalam Todaro & Smith, (2011).

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi, Adapun isu mengenai siklus krisis ekonomi setiap 10 tahun merujuk pada krisis yang terjadi pada 1998 dan 2008. Penyebab utama krisis 1998 adalah nilai tukar mata uang, terutama di Asia, yang tidak fleksibel, juga tidak ada sinkronisasi terhadap kurs dan capital inflow (arus modal masuk). Sedangkan penyebab krisis 2008 salah satunya akumulasi dari risiko perkembangan teknologi.

Menurut ekonom Bank Dunia, Frederico Bil Sander, tidak ada siklus seperti itu, apalagi sampai mengancam Indonesia pada tahun mendatang. Frederico menilai kondisi Indonesia saat ini sudah jauh membaik dibanding saat krisis 1998 dan 2008.

Frederico mengatakan fondasi makroekonomi Indonesia saat ini sangat kuat. Pemerintah Indonesia, menurut dia, telah punya cukup persiapan untuk menghadapi potensi krisis. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya level ekspor setelah perbaikan nilai komoditas. "Level konsumsi yang sempat menurun pada paruh pertama 2017 mulai meningkat pada kuartal ketiga 2017, sekitar 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Salah satu untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi ialah perubahan pendapatan nasional riil. Negara yang dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional riilnya naik dari waktu ke waktu. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari penambahan pendapatan nasional riil yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) yang berlaku dari tahun ke tahun.

Menurut Price waterhouse Coopers (PwC) pertumbuhan ekonomi di negara berkembang akan mulai mendominasi peringkat ekonomi utama dunia pada 2030. Dalam jajaran 21 negara ekonomi terkuat, Indonesia berada di peringkat ke-5. PwC melihat bahwa pasar negara berkembang, seperti India dan Brasil, termasuk Indonesia akan semakin menantang dominasi Amerika Serikat dan China, sementara yang lainnya tertinggal. Laporan tersebut menempatkan negara-negara dengan memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) global mereka, dan purchasing power

parity (PPP). Di mana PPP merupakan model yang menggambarkan daya beli terhadap nilai dari mata uang tertentu. Berikut daftar 21 negara ekonomi paling kuat di dunia pada 2030 yang diproyeksikan PwC:

Tabel 1.1

Daftar 21 Negara Ekonomi paling kuat didunia tahun 2030 yang di proyeksikan

No	Negara	Jumlah USD
1	China	38.008 triliun
2	Amerika Serikat	23,475 triliun
3	India	19,511 triliun
4	Jepang	5.606 triliun
5	INDONESIA	5.424 triliun
6	Rusia	4.736 triliun
7	Jerman	4,707 triliun
8	Brasil	4,439 triliun
9	Meksiko	3,661 triliun
10	Inggris	3.638 triliun
11	Prancis	3,377 triliun
12	Turki	2,996 triliun
13	Arab Saudi	2.755 triliun
14	Korea Selatan	2,651 triliun
15	Italia	2,541 triliun
16	Iran	2.354 triliun
17	Spanyol	2.159 triliun
18	Kanada	2,141 triliun
19	Mesir	2,049 triliun
20	Pakistan	1,868 triliun
21	Nigeria	1.794 triliun

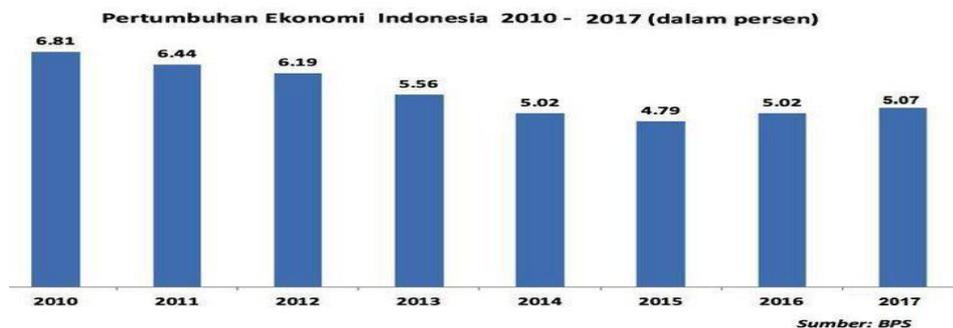
Sumber: Price waterhouse Coopers (PwC) (www.Pwc.com)

Semua angka yang disebutkan di atas dalam dolar AS dan dengan nilai konstan (untuk referensi, PPP AS saat ini dalah USD18,569 triliun)

Pertumbuhan ekonomi disetiap negara pun berbeda beda tergantung dengan pendapatan perkapita itu sendiri dan tergantung dengan pendapatan penduduknya. Semakin tinggi pendapatan penduduknya maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di Negara tersebut dan sebaliknya dengan rendah nya pendapatan penduduk itu sendiri maka akan berdampak pada rendahnya pendapatan nasional pada Negara itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu Negara. Semua berpengaruh pada kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu Negara pun terus memajukan pendapatan nasional mereka dengan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dengan menjadikan pendapatan nasional yang akan lebih baik dan tingkat perekonomian kita pun semakin baik.

Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 2010-2017



sumber: Badan Pusat Statistik 2017 (www.Bps.go.id)

Dapat dilihat dari gambar diatas, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sampai 2015 di Indonesia pertumbuhannya mengalami penurunan yang

sangat jauh dan kembali meningkat kembali pada tahun 2016 sampai dengan 2017 tetapi peningkatannya hanya sedikit. Siklus pertumbuhan ekonomi sedang memasuki perlambatan sejak akhir 2015 setelah puncak pada 2010. Pada 2010 pertumbuhan ekonomi masih 6,81% dan menurun menjadi 4,79%. Setelah mencapai titik terendah pada tahun 2015, ekonomi kembali tumbuh 5% dan mencapai angka tertinggi pada 2017 sebesar 5,07%.

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita dalam Todaro & Smith (2011). Dengan pembangunan diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat ke arah lebih baik. Ukuran keberhasilan pembangunan idealnya harus mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut, bukan segelintir kelompok atau orang saja.

Indonesia merupakan negara kesatuan, dimana rencana pembangunan meliputi rencana nasional maupun rencana regional. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang menyebabkan prestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah menjadi lebih meningkat. Hal ini dapat dilihat pada variabel seperti pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah sebagai proporsi sebelumnya dalam struktur perekonomian negara maupun struktur perekonomian daerah selama kurun waktu tertentu dalam Todaro & Smith (2011). Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Di beberapa negara tujuan tersebut kadang-kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam Deininger & Pedro, (2000).

Kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan adalah dua hal yang sedang gencar-gencarnya ditekan pertumbuhannya oleh pemerintah. Ketidakmerataan terkait erat dengan kemiskinan karena secara mendasar adalah indikator kemiskinan relatif, yaitu kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Rendahnya ketidakmerataan, atau semakin meratanya distribusi pendapatan, tentunya merupakan salah satu agenda penting pembangunan ekonomi dalam Arifianto & Setiyono, (2013).

Dalam melaksanakan pembangunan nasional dikenal dengan adanya Trilogi Pembangunan yang memiliki 3 unsur yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam melaksanakan kebijaksanaan Trilogi pembangunan itu kita harus melihat ketiga unsur Trilogi

pembangunan tersebut saling mengkait dan dikembangkan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat.

Pembangunan di Indonesia menerapkan konsep sistem pemerataan pembangunan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga bisa mengantisipasi urbanisasi. Adapun data tingkat urbanisasi dari desa ke kota di Indonesia ditunjukkan seperti gambar dibawah ini :

Gambar 1.2

Diagram batang Urbanisasi Desa – Kota



Sumber: *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035* (www.Bps.go.id)

Berdasarkan gambar diatas, proyeksi penduduk urbanisasi dari desa ke kota selalu meningkat dari tahun ke tahunnya Urbanisasi yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pertumbuhan konsentrasi penduduk yang tinggi. Lebih buruk lagi, hal ini tidak

diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasi. Masalah ini akhirnya menimbulkan fenomena yaitu urbanisasi berlebih.

Adanya urbanisasi yang berlebih ini telah menimbulkan berbagai masalah di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan masalah di kota yang dituju namun juga menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan. Masalah yang terjadi kota antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuhnya juga meningkat, peningkatan urban crime dan masih banyak masalah lain. Di desa juga akan timbul masalah diantaranya yakni berkurangnya sumber daya manusia karena penduduknya telah pergi ke kota, desa akhirnya tidak mengalami perkembangan yang nyata. Kondisi perkotaan yang semakin tidak terkendali akibat adanya urbanisasi yang berlebih, telah menimbulkan berbagai masalah baru seperti meningkatnya kriminalitas akibat kemiskinan, pengangguran besar-besaran, bertambahnya pemukiman kumuh, dan lain sebagainya.

Pembangunan Indonesia juga mempunyai target dalam mengatasi urbanisasi dan pemerataan pembangunannya. Pembangunan sosial dan ekonomi tidak merata antar wilayah merupakan salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia. Selain antar wilayah juga terjadi antara kawasan kota dan pedesaan. Keduanya memiliki kualitas pelayanan dasar yang tidak merata. Hal ini sangat krusial bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konsep *Millenium Development Goal's* atau yang disebut MDG's) tahun 2015 dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan

masyarakat pada berbagai tujuan dan target. Adapun delapan tujuan MDG's yaitu: menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; memastikan kelestarian lingkungan hidup; serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Tujuan – tujuan tersebut dicanangkan secara khusus untuk dicapai pada tahun 2015 dalam Todaro & Smith, (2011)

Setelah era MDGs yang telah berakhir pada 2015, pembangunan mulai disusun dengan mengatasi berbagai hambatan-hambatan untuk kemajuan pembangunan termasuk soal ketimpangan, tata kelola yang efektif dan inklusif, masyarakat damai dan beberapa persoalan lainnya. Penyempurnaan tersebut melahirkan tujuan dan target yang tersusun dalam 17 poin tujuan dan 169 target *Sustainable Development Goals* atau yang dikenal dengan SDGs yang akan berlaku hingga 2030. Prinsip dalam pelaksanaan SDG's ini dalam pembangunan harus memberi manfaat untuk semua dalam UNDP (2015).

Untuk memperkuat Trilogi Pembangunan maka pemerintah pada masa Soeharto mengeluarkan 8 jalur pemerataan menurut Garis – garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan; (4) pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha; (6) pemerataan

kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; (7) pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air; dan (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dalam Gilarso, (2004).

Dalam pemerintahan era Presiden Jokowi-JK sekarang, pembangunan berfokus dalam membangun daerah pinggiran. Desa didorong untuk selalu melakukan inovasi dan terus melakukan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Besarnya dana transfer ke desa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar pedesaan dan perkotaan. Namun permasalahan yang masih kita lihat yaitu kesenjangan sosial ekonomi, kemiskinan, tingkat stress tinggi, penyalahgunaan lahan, pencemaran lingkungan, tingkat kesadaran masyarakat rendah, pelanggaran hukum, dan masih banyak anak putus sekolah. Untuk itu pemerintahan adalah hal yang ingin dilihat oleh semua orang dalam mengatasi masalah tersebut, maka pondasi pemerintahan itu harus menyatu, membawa tata kelola yang lebih baik hingga ke tingkat kabupaten bahkan desa.

Di era Presiden Jokowi-JK periode tahun 2014-2019 telah merencanakan program pemerintah pada titik berat dalam pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Membangun Indonesia dari pinggiran itu berarti desa harus dibangun karena sebagian besar penduduk Indonesia ada didesa. Masyarakat desa harus diposisikan sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat desa diberi kewenangan untuk dapat mendefinisikan kebutuhannya sendiri sehingga program dan kegiatan pembangunan desa harus menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat desa. Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan di Desa. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Adapun perbedaan penyaluran Dana Desa pada tahun 2017 dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perbandingan APBN 2017 dan APBN 2018

Postur APBN 2018

Uraian (triliun rupiah)	2017	2018	% thd Outlook 2017	Selisih
	Outlook	APBN		
A. PENDAPATAN NEGARA	1.736,1	1.894,7	109,1	158,7
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.733,0	1.893,5	109,3	160,6
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472,7	1.618,1	109,9	145,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260,2	275,4	105,8	15,2
II. PENERIMAAN HIBAH	3,1	1,2	38,5	(1,9)
B. BELANJA NEGARA	2.098,9	2.220,7	105,8	121,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.343,1	1.454,5	108,3	111,4
1. Belanja K/L	769,2	847,4	110,2	78,2
2. Belanja Non K/L	573,9	607,1	105,8	33,2
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	218,6	238,6	109,2	20,0
b. Subsidi	168,9	156,2	92,5	(12,6)
c. Belanja Lain-lain	56,0	67,2	120,1	11,2
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	755,9	766,2	101,4	10,3
1. Transfer ke Daerah	697,7	706,2	101,2	8,5
a.l. a. Dana Bagi Hasil	95,4	89,2	93,5	(6,2)
b. Dana Alokasi Umum	398,6	401,5	100,7	2,9
2. Dana Desa	58,2	60,0	103,1	1,8
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(144,3)	(87,3)	60,5	57,0
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(362,9)	(325,9)	89,8	36,9
% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,67)	(2,19)		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)	362,9	325,9	89,8	(36,9)
I. PEMBIAYAAN UTANG	427,0	399,2	93,5	(27,8)
a.l. Surat Berharga Negara (neto)	433,0	414,5	95,7	(18,4)
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59,7)	(65,7)	109,9	(5,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(3,7)	(6,7)	182,4	(3,0)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,0)	(1,1)	111,5	(0,1)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	0,3	0,2	61,0	(0,1)

Sumber: Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan

Sumber: Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan dari tabel APBN diatas, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2018, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2018 dialokasikan sebesar

Rp2.220.657,0 miliar, naik 5,8 persen dari pagunya pada outlook APBNP tahun 2017. Belanja negara di tahun 2018 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454.494,4 miliar, yang terdiri atas anggaran untuk belanja K/L sebesar Rp847.435,2 miliar dan belanja non K/L sebesar Rp607.059.2 miliar, serta anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp766.162,6 miliar. Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi fungsi dikelompokkan menjadi 11 fungsi. Dalam APBN tahun 2018, fungsi yang memiliki porsi terbesar adalah fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi, yang masing-masing sebesar 30,0 persen dan 23,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 46,9 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2018 mengalami defisit anggaran sebesar Rp325.936,6 miliar atau 2,19 persen terhadap PDB, yang berarti turun dari defisit pada outlook APBNP tahun 2017 sebesar 2,67 persen. Defisit RAPBN tahun 2018 tersebut ditetapkan akan dibiayai dari kombinasi pembiayaan utang dan pembiayaan non utang.

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari

pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan dan Lain-lain Pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

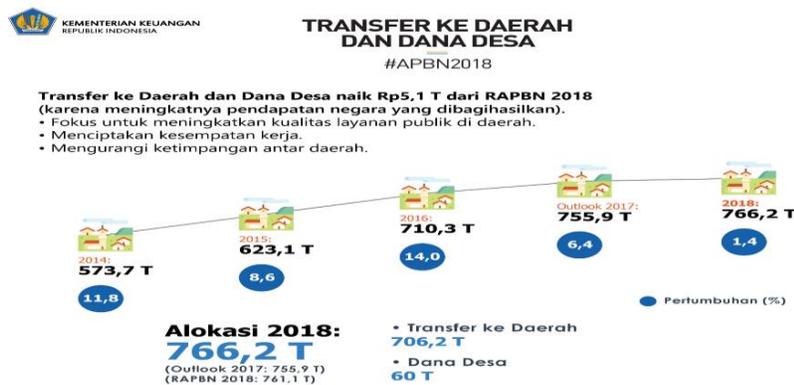
Sejak dimulainya program Dana Desa, pemerintahan dan masyarakat mengutarakan begitu banyak harapan untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat serta untuk membangun infrastruktur dan sektor padat karya yang bisa langsung berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini juga diharapkan dapat menjadikan desa sebagai pilar penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan dan ketertinggalan. Dana Desa dalam kebijakan Jokowi-JK sangat berkembang pesat dan terus meningkat. Dengan adanya Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa dengan cara memanfaatkan potensi desa sehingga akan meningkatkan kualitas pendapatan masyarakat desa.

Pada era Jokowi-JK Dana Desa memiliki tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi

tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana tersebut dalam Kemendes PDTT, 2016).

Secara teknis, Dana Desa sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Sedangkan menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa terdapat pada Pasal 18 yang menerangkan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).



Gambar 1.3 Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Sumber: Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id)

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Pada 2017, pemerintah mengalokasikan Rp 60 triliun untuk dana desa. Rata-rata per desa akan mendapatkan Rp 800,4 juta. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 46,98 triliun atau rata-rata mendapat Rp 643,6 juta per desa. Wilayah Jawa akan mendapatkan dana desa sebesar Rp 18,65 triliun.

Desa dalam kebijakan pemerintahan Jokowi – JK sangat berkembang pesat dan terus meningkat. Dengan adanya Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa dengan cara meningkatkan potensi desa sehingga kualitas hidup masyarakat di desa bisa meningkat juga.

Berdasarkan uraian dana desa di atas, pemerintah mulai membuat Strategi kebijakan dana desa tersebut dari konsep *Bottom up of economic development model*. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam pelaksanaan strategi kebijakan dana desa adalah sebagai penunjang aktivitas masyarakat di desa seperti pembangunan jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMDes, tambatan perahu, embung, irigasi, dan sarana olahraga. Selain itu konsep kebijakan dana desa juga dapat meningkatkan kualitas masyarakat desa.

Desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, pertanian, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

BUMDes memiliki peran untuk menegakkan pilar-pilar ekonomi Pancasila. Setiap langkah BUMDes mulai dari pembentukan, pengembangan, hingga manfaat yang diberikan semuanya berlandaskan pada ideologi Pancasila. BUMDes memakai sistem musyawarah untuk mengambil keputusan, bekerja dengan mempertimbangkan konteks local dan hasilnya langsung bisa dirasakan warga desa sehingga pada gilirannya akan menguatkan solidaritas warga. Tujuan BUMDes dalam kaitannya dengan tujuan Negara yaitu mencapai kemakmuran. BUMDes harus mampu melaksanakan semangat kedaulatan kemandirian ekonomi desa.

Pendirian BUMDes merupakan salah satu program kebijakan pemerintah yang diberi perhatian lebih dan dijadikan unggulan dalam upaya menjadikan desa menjadi lebih maju dan sejahtera. Presiden telah mengemukakan apa saja yang menjadi titik penting didirikannya BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. BUMDes bisa dilihat sebagai gerakan desa wirausaha, yang mana desa akan mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber dayanya untuk menggerakkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif. Menciptakan sentra ekonomi di desa diharapkan mampu mengurangi Urbanisasi dan pengangguran.

Permendes No. 4/2015 tentang BUMDes pasal 2 dijelaskan pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa. BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan gotongroyong untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari data Kementerian Desa, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di seluruh bumi nusantara. Jumlah itu lima kali lipat dari target Kementerian Desa yang hanya mematok 5000 BUMDes yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1022 Desa. Kepemilikan BUMDes terbanyak berada di Jawa Timur dengan 287 BUMDes, kemudian Sumatra Utara dengan 173 BUMDes. Ini masih jauh dari yang diharapkan, jika di rata-rata nasional, presentase jumlah BUMDes dari total 74.910 desa di Indonesia masih sangat terbatas yakni sebesar 1,4 persen, padahal BUMDes ini penting untuk kemajuan dan kesejahteraan desa.

Adapun aspek dari di bentuknya BUMDes antara lain yaitu pembangunan unit pasar desa, unit perdagangan, unit simpan pinjam, unit pariwisata, unit peternakan, unit jasa pelayanan, unit pertanian, unit persewaan asset desa, dan unit pengairan. Dana BUMDes ini di peroleh dari APBN lewat penyaluran Dana Desa yaitu dari Rekening Kas Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan diteruskan ke Rekening Desa.

Di provinsi Sumatera Utara, terdapat 11 desa di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, tetapi hanya baru 6 desa yang terbentuk BUMDesnya, namun ada kemungkinan 4 desa lagi akan segera membentuk BUMDesnya masing-masing. Beringin merupakan salah satu dari 22 Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang dengan 11 desa. Posisinya persis langsung berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas wilayah 54,32 km². Tahun 2018, jumlah penduduk di Kecamatan Perbaungan mencapai berjumlah 56.600 jiwa dengan 14.357 kepala keluarga.

Berdasarkan pra riset yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari wakil camat beringin bahwasannya masih ada desa yang sudah mempunyai BUMDes tetapi data mengenai BUMDesnya belum dilaporkan atau diserahkan kepada pihak kecamatan sehingga pihak kecamatan belum bisa melengkapi secara sempurna data dan nama BUMDes di 11 desa ini, kemungkinan pihak kecamatan akan segera melakukan pendataan langsung ke desanya atau survey satu persatu desanya agar segera bisa melengkapi data mengenai BUMDes di Kecamatan Beringin.

Tabel 1.3**Data BUMDes di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang 2018**

Desa	Nama BUMDes	Unit Usaha	Perdes No BUMDes	kegiatan	
				Berjalan	Belum Berjalan
Beringin	Maju Bersama	Sewa permainan anak-anak	12/1/2017	ya	
Sidodadi	Sejahtera	Pembelian Hasil Produk petani	25/kep-Des/503/2017	ya	
Psr V Kebun Kelapa	Palapa	Ternak Domba	2/1/2017	ya	
Karang Anyar					
Aras Kabu	Araskabu Jasa	Fotocopy, Depot air	3/1/2017	ya	
Emplasman Kualanamu	Waserba	Warung serba ada	11/1/2016		ya
Tumpatan					
Sidourip	Jays Gumilang	Peternakan	4/1/2016	ya	
Psr VI Kualanamu					
Sidoarjo II Ramunia					
Serdang					

Sumber: Kantor Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang 2018

Berdasarkan Tabel Diatas, ada beberapa desa yang belum mempunyai BUMDes dan sebagian lagi ada yang sudah ada tapi belum berjalan. Sejak dimulainya Era Jokowi-JK Selama 4 tahun belakangan ini Dana Desa sudah disalurkan tetapi pembangunan BUMDes dimulai dan dilaksanakan pembentukannya pada awal tahun 2016. Dana Desa yang disalurkan pemerintah untuk pembiayaan BUMDes ini belum optimal dilaksanakan oleh pemerintah desa Kecamatan Beringin. Sementara itu terkait dengan peraturan daerah atau peraturan desa sebagai payung hukum BUMDes, diketahui sampai saat ini telah diterbitkan sebanyak 45 peraturan daerah dan 416 peraturan desa yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Mengingat pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi masyarakat desa untuk mengembangkan ekonomi desa, maka di tetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota yaitu berupa dana desa dan alokasi dana desa yang di salurkan kepada BUMDes guna untuk mengembangkan ekonomi

desa di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Dengan adanya BUMDes maka diharapkan ekonomi desa dapat berkembang dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat desa dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa. BUMDes ada karena adanya kegagalan pasar yang terjadi, maka dari itu pemerintah membentuk BUMDes sebagai bentuk pemerintah untuk mengembangkan potensi desa dan mengembangkan ekonomi desa.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu, penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“PENGARUH KEBIJAKAN BUMDES TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DI KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah mengenai pengaruh kebijakan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tersebut yaitu:

1. Tidak meratanya pembangunan BUMDes di Sumatera Utara terutama di wilayah Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.
2. Tidak efektifnya pengelolaan BUMDes yang dimilikinya Kecamatan Beringin kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program namun belum membuahkan hasil yang memuaskan bagi pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah diatas, maka peneliti fokus membatasi masalah pada pengaruh kebijakan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi pedesaan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilaksanakan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dana desa dan alokasi dana desa untuk APBDes di desa Se Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.
2. Bagaimana persepsi dari masyarakat desa tentang BUMDes yang ada di desa Se Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.
3. Bagaimana profil dan bentang alam dari desa yang ada di Kecamatan Beringin dalam melihat potensi ekonomi desa

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan dana desa dan alokasi dana desa untuk APBDes desa Se Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.
2. Melakukan analisa deskriptif tentang persepsi masyarakat desa tentang BUMDes yang ada di desa Se Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.
3. Melakukan studi kelayakkan (*feasibility study*) untuk mengukur potensi ekonomi di desa Sidodadi Ramunia dan Sidourip.

1.6 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian diatas, penelitian ini dapat bermanfaat, yakni:

1.6.1 Manfaat akademik :

1. Dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi penelitian yang akan datang yang mengangkat tema penelitian yang sama.
2. Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait

1.6.2 Manfaat non akademik

1. Bagi pemerintah daerah desa di kecamatan Beringin kabupaten Deli Serdang dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan kebijakan daerah khususnya tentang BUMDes

2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
3. Dapat menjadi suatu pemahaman bagi para pembaca agar memberikan suatu ilmu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Secara umum pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi secara luas didefinisikan sebagai pembangunan yang terjadi melalui proses multidimensional yang dimana didalamnya terdapat berbagai macam variabel dari perubahan besar yang dimana terjadi dalam sebuah struktur sosial, sikap dari masyarakat, berbagai macam kelembagaan nasional dan juga percepatan dari pertumbuhan ekonomi, dan juga pengurangan serta ketidakmerataan, dan yang terakhir adalah penghapusan dari kemiskinan mutlak (Todaro, 2000). Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dalam Todaro dan Smith, (2006).

Pengalaman pembangunan dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, pada saat Negara-negara berkembang mencapai target pertumbuhan ekonomi namun tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tetap tidak berubah, menunjukkan ada yang sangat salah dengan pengertian pembangunan.

Singkatnya, selama dasawarsa 1970-an, pembangunan ekonomi mulai didefinisikan ulang dalam kaitannya dengan upaya pengurangan atau peniadaan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks perekonomian yang semakin berkembang (Todaro & Smith, 2011)

Pembangunan memiliki konsep melalui proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu dalam Todaro . Oleh karena itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Upaya pembangunan juga untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro & Smith, pembangunan ekonomi, 2011).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro & Smith, 2011)

Todaro dalam (Arsyad 1999:5) juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi:

1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*) 2) meningkatnya rasa harga diri (*selfesteem*) masyarakat sebagai manusia; dan 3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental dari suatu masyarakat, melalui kombinasi tertentu dari proses, sosial, ekonomi, dan lembaga yang memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tujuan (Todaro & Smith, pembangunan ekonomi, 2011) .

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualisme ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2011)

A. Teori Klasik

1. Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini:

a. Hukum alam

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur-tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional.

b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan: (1) meningkatnya keterampilan pekerja (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; (3) penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab

yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

c. Proses Pemupukan Modal

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan.” Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga-dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

2. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (*dicontinuous*) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya (Jhingan, 2010). Pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal (Jhingan, 2010).

Makna pembangunan ekonomi menurut Schumpeter yang mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dalam keseimbangan yang mantap itu terkandung keseimbangan persaingan sempurna. Keseimbangan itu ditandai oleh apa yang menurut istilah Schumpeter disebut “arus sirkuler” yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi selalu berulang dalam suatu alur perekonomian yang tak habis-habisnya. Menurut Schumpeter, arus sirkuler adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dan lahan pertanian yang mengalir secara terus-menerus, dan aliran tersebut mengalir pada setiap periode ekonomi ke dalam waduk yang kita sebut dengan pendapatan, untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan.(Jhingan, 2010).

Schumpeter menggambarkan proses pembangunan kapitalis ini sebagai suatu destruktif kreatif, yang membuat struktur ekonomi masyarakat lama terus-menerus diruntuhkan dan struktur baru terus dibangun di atasnya. Secara singkat, pengusaha merupakan tokoh kunci utama di dalam analisa Schumpeter. Mereka menghasilkan

pembangunan ekonomi dalam cara yang spontan dan terputus-putus. Dan gerakan siklis merupakan biaya pembangunan ekonomi dibawah kapitalisme, suatu ciri tetap perjalannya yang dinamis. Penerapan teori Schumpeter pada Negara terbelakang begitu terbatas seperti perbedaan tatanan sosio-ekonomi, kurangnya kewirausahaan, tidak dapat diterapkan pada Negara sosialis, tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran, yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi, mengabaikan konsumsi, tabungan, pengaruh eksternal, pertumbuhan dan penduduk. Walaupun demikian, teori Schumpeter menggaris bawahi pentingnya pembiayaan inflasioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi (Jhingan, 2010).

2. Teori David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation*. Buku ini diterbitkan 1917. Edisi ketiga 1921 serta korespodensi Ricardo dengan beberapa ahli ekonomi lainlah yang menurut ide-ide Ricardo yang menjadi dasar pembentukan model pembangunan Ricardo. Dalam membangun teorinya Ricardo berpendapat bahwa ada hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis dan buruh. kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi-bagikan (Jhingan, 2010).

Asumsi teori Ricardo Teori-teori Ricardian didasarkan pada asumsi bahwa:

- 1) Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri;
- 2) “law of diminishing return” berlaku bagi tanah;
- 3) Persediaan tanah adalah tetap;
- 4) Permintaan akan gandum benar-benar inelastis;
- 5) Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel;
- 6) Keadaan pengetahuan teknik adalah tertentu (*given*);
- 7) Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal;
- 8) Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap;
- 9) Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal; dan bahwa baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja;
- 10) Terdapat persaingan yang sempurna;
- 11) Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan;

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo sendiri menulis dalam pendahuluan bukunya, “Hasil bumi (hasil yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh secara terpadu, mekanisasi, dan modal) dibagi-bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakan.” Keseluruhan pendapatan

nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok tersebut masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah. (Jhingan, 2010).

3. Teori Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (marginal product) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian,

nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para

Pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sektor modern tersebut. Percepatan ekspansi output sangat ditentukan oleh ekspansi di sektor

industri dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut (Jhingan, 2010).

4. Teori Hollis B. Chenery

Hollis B. Chenery tentang Analisis teorinya *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (*human capital*) (Todaro & Smith, 2011).

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas di

sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa tansisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2011)

B. Teori Neoklasik

Teori ini berkembang pada pertengahan tahun 1950-an. Analisis pertumbuhan ekonominya didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Teori ini menyanggah Teori Keynesian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terletak pada tingkat pengeluaran (konsumsi) masyarakat. Menurut teori ini, pertumbuhan terletak pada penawaran (supply) faktor produksi dan tingkat produksi. Semakin tinggi tingkat sumber ekonomi dan teknologi, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai paradigma pembangunan neo-klasik. Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut,

1. Adanya akumulasi capital merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Menurut neo-klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat tertentu, tingkat bunga menentukan tingginya tingkat investasi.
2. Perkembangan merupakan proses yang gradual. Perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berlangsung terus-menerus.
3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. Proses perkembangan meliputi semua faktor yang terlibat itu tumbuh bersama. Sebagai

contoh alat-alat produksi yang tersedia akan memiliki tingkat produktivitas tinggi bila faktor sumber daya manusianya juga mendukung.

4. Aliran neo-klasik merasa optimis terhadap perkembangan. Aliran sebelumnya (klasik) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terhambat karena terbatasnya sumber daya alam, sedangkan aliran neo-klasik yakin bahwa manusia mampu mengatasi keterbatasan tersebut.
5. Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut. Dengan adanya pasar yang luas, memungkinkan produksi sebesar-besarnya sehingga produktivitas semakin meningkat.

Menurut teori neo-klasik, negara merupakan unit analisis utama, penekanan ini secara implisit menyatakan cara pandang neo-klasik terhadap sejarah yang linear dan suatu asumsi bahwa negara per negara bisa maju dengan usaha sendiri serta berkembang dari keadaan belum maju atau terbelakang menjadi progresif.

Prinsip kunci pandangan neo-klasik tentang pembangunan adalah memaksimalkan keuntungan bagi konsumen dan produsen secara individual, keuntungan bersama yang bisa diperoleh dari perdagangan nasional dan Internasional, serta pencapaian kemajuan ekonomi dan sosial dengan cara mengejar kepentingan pribadi yang senantiasa dicerahkan. Kenyataannya, keuntungan yang diharapkan jarang terpenuhi dan prinsip-prinsip itu sendiri sedikit berhubungan, atau tidak berjalan seiring dengan realitas ekonomi atau realitas sosial. Ini terjadi juga di negara-negara maju, terlebih lagi di negara-negara belum maju. Ketika beberapa negara baru memperoleh kebebasannya (kemerdekaan), pembangunan di bidang ekonomi perlu dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Berbagai cara,

pendekatan, dan tindakan dilakukan dalam hal kebijakan dan prioritas pembangunan semata-mata dimaksudkan untuk menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

C. Keynes

Ekonomi Keynesian merupakan nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari *Great Depression*. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*.

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi Great Depression, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laissez-faire* capitalism (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah.

Teori Keynes mengemukakan kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran: jika segment masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya; yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide pokok dari teori Keynes ini adalah “Peranan Pemerintah” yang tadinya diharamkan dalam Teori Ekonomi Klasik. John Meynard Keynes menjelaskan teori ekonominya dalam buku karangannya berjudul “*The General Theory Of Employment, Interest And Money*”. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrold Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Teori Keynes tidak dapat diterapkan pada setiap tatanan sosio-ekonomi. Ia hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang telah maju. Sebagaimana tulis Schumpeter, “ajaran praktis Keynes merupakan bibit yang tidak dapat dipindahkan ke tanah seberang, ia akan mati di sana dan bahkan menjadi beracun sebelum mati. Tetapi ditanah Inggris, tanaman ini tumbuh dengan subur dan menjanjikan buah dan keteduhan. Begitu juga dengan saran lain yang pernah dikemukakan Keynes. (Jhingan, M.L, 2010)

D. Konsep Millenium Development Goals (MDG's) to SDG's

Pada bulan September tahun 2000, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyetujui dan digagas *Millenium Development*

Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015, dengan berbagai tujuan dan target yakni :

- 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem
- 2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- 4) Menurunkan angka kematian anak
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Kedelapan tujuan tersebut bila melihat pencapaian pembangunan yang telah mencapai batas waktu yakni tahun 2015, mungkin masih banyak hal yang belum tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada MDGs ternyata mendapat sorotan dan kritikan. Kritik-kritik tersebut antara lain tujuan dan target MDGs disusun melalui proses yang sangat birokratis dan teknokatis. Kedua, desain dari tujuan dan target tersebut juga dikritik oleh beragam perspektif. Sebagai misal, tidak ada perhatian yang cukup terhadap persoalan ketimpangan dan kesetaraan gender dalam tujuan-tujuan MDGs. Ketiga, tujuan, target, dan indikator

yang ada merefleksikan fokus area dan data yang diasumsikan tersedia, namun dalam beberapa kasus data tersebut ternyata tidak lengkap atau bahkan tidak ada. Keempat, kurangnya akuntabilitas dan universalitas terutama untuk negara-negara donor dalam memenuhi tujuan ke-8 dari MDGs (UNDP, 2015).

Setelah era MDGs yang telah berakhir pada 2015, kini sedang disusun sebuah dokumen pembangunan baru untuk melanjutkan capaian-capaian yang belum sempat terealisasi sembari menyempurnakan target-target yang lebih relevan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi rakyat. Oleh karena itu, pembangunan pasca-2015 tersebut mulai disusun dengan mengatasi berbagai hambatan-hambatan untuk kemajuan pembangunan termasuk soal ketimpangan, tata kelola yang efektif dan inklusif, masyarakat damai dan beberapa persoalan lainnya. Penyempurnaan tersebut melahirkan tujuan dan target yang tersusun dalam 17 poin tujuan dan 169 target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang akan berlaku hingga 2030.

Bila disimpulkan tujuan dan target SDGs atau pembangunan pasca-2015 ini yang akan berlaku hingga 2030, dimensi pokoknya terletak pada persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinggungan satu sama lain (UNDP, 2015). Keterhubungan antara dimensi tersebut, menuntut sebuah proses pengawalan yang serius agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai dimensi yang dikelola oleh berbagai bidang dalam pemerintahan.

2.1.2 Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional merupakan jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa oleh suatu negara dalam tahun tertentu. Pendapatan Nasional secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan pendapatan/ balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah. Pendapatan nasional yang merupakan salah satu indikator ekonomi makro, merupakan variabel penting guna mencari hubungan di antara variabel-variabel lain dalam ekonomi makro. Perubahan di dalam variabel pendapatan nasional mempunyai pengaruh terhadap variabel yang lain. Pendapatan Nasional di anggap pilar utama penyangga Politik Ekonomi artinya kearah Pendapatan Nasional itulah hampir semua kebijakan di bidang perekonomian difokuskan.

Metode perhitungan pendapatan nasional merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah atau besar dari nilai pendapatan nasional tersebut. Selain untuk mengetahui jumlah pendapatan nasional suatu negara, metode perhitungan pendapatan nasional juga bisa dijadikan alat evaluasi. Di mana, Negara bisa menilai dan mengevaluasi kinerja para sumber daya manusianya dan mengukur produktivitas negaranya.

Terdapat 3 (tiga) metode perhitungan yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan nasional, yaitu metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi (*Production Approach*), pendekatan

pengeluaran (*Expenditure Approach*), dan pendekatan pendapatan (*Income Approach*).

1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah (value added). Jadi pada perhitungan pendekatan produksi, hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor (lahan) produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah (value added) dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu (biasanya dalam satu tahun).

Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai produksi (nilai output) dengan nilai biaya antara (nilai input), yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku dan bahan penolong.

ISIC(*International Standard Industrial Classification*) mengklasifikasikan perekonomian Indonesia menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi dalam tiga kelompok, diantaranya:

1. Sektor Primer

Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalan.

2. Sektor Sekunder

Industri pengolahan. listrik, air, dan gas.

3. Sektor Tersier

Perdagangan, hotel, dan restoran. Pengangkutan dan telekomunikasi.

Jasa lain-lain.

Rumus Pendekatan Produksi adalah sebagai berikut:

$$Y=(P_1 \times Q_1)+(P_2 \times Q_2)+\dots+(P_n \times Q_n)$$

Keterangan :

Y= Pendapatan nasional

P₁= harga barang ke-1 P_n= harga barang ke-n

Q₁= jenis barang ke-1 Q_n= jenis barang ke-n

2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan pendapatan (*income approach*) adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau satu tahun. Yang termasuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian/kewirausahaan. Masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda, misalnya:

- Tenaga kerja dapat memperoleh gaji/upah
- Pemilik modal akan mendapat bunga
- Pemilik tanah dapat memperoleh sewa
- Keahlian atau skill dapat memperoleh laba.

Rumus pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut:

$$Y = r + w + i + p$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

r = Pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya

w = Pendapatan bersih dari sewa

i = Pendapatan dari bunga

p = Pendapatan

3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari

- Pengeluaran untuk konsumsi (C)
- Pengeluaran untuk investasi (I)
- Pengeluaran untuk pemerintah (G)
- Pengeluaran untuk ekspor (X), dan impor (M).

Sehingga diperoleh rumus pendekatan pengeluaran sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan nasional

C = consumption (konsumsi rumah tangga)

I = investment (investasi)

G = government expenditure (pengeluaran pemerintah)

X = ekspor

M = impor

Dengan menggunakan 3 metode pendekatan pendapatan nasional yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran dapat membantu suatu negara untuk

menentukan jumlah atau besarnya pendapatan nasional. Karena besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara menentukan maju dan berkembangnya suatu negara karena berhubungan dengan laju perekonomian negara.

Pendapatan Nasional itu merupakan alat ukur bagi tinggi rendahnya tingkat hidup atas kemakmuran suatu bangsa. Secara kuantitatif tingkat hidup atau kemakmuran suatu bangsa itu ditentukan oleh perbandingan antara jumlah Pendapatan Nasional dengan jumlah penduduknya. Konsep ini biasa kita kenal dengan istilah pendapatan perkapita. Walaupun pendapatan perkapita itu sendiri belum menggambarkan tingkat kemakmuran seluruh rakyat. Pendapatan Nasional berguna untuk menentukan dan kemudian menyusun sebagai kebijakan yang dipandang perlu. Dari sektor pertanian umpamanya, dapat disusun berbagai kebijakan seperti pengadaan pangan, industri pupuk, irigasi dan sebagainya.

Suatu negara yang menunjukkan ketidakmerataan tinggi akan terlihat adanya kenyataan yang jauh antara kaya dan miskin, kenyataan itu perlu dibenahi guna tercapainya stabilitas ekonomi negara. Berbagai strategi / kebijakan perlu dilakukan untuk mengatasinya. Berbagai strategi / kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidak merataan yang tinggi antara lain :

1. Pembangunan di bidang pertanian.
2. Pembangunan sumberdaya manusia.
3. Meningkatkan peran berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

2.1.3 Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu diajukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Instrumen pusat dari kebijakan pengeluaran adalah anggaran. Dalam membicarakan penyebab pokok dari pertumbuhan pengeluaran, harus dilakukan pembedaan antara pengeluaran untuk barang dan jasa, dan pengeluaran untuk transfer, karena adanya faktor-faktor yang agak berbeda (Musgrave & B Musgrave, 1993). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya sedangkan dana yang diterima dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun Teori Pengeluaran Negara sebagai berikut :

1. Musgrave dan Rostow

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.

2. Wagner

Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dan lain-lain.

Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesebroto, 1993;

170). Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Berikut Formula Hukum Wagner :

$$\begin{array}{ccc}
 PkPPP1 & PkPPP2 & PkPPPn \\
 \hline
 PPK1 & PPK2 & \dots \quad PPKn
 \end{array}$$

Keterangan:

PPP : Pengeluaran Pemerintah perkapita

PPK : Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,...n : Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam gambar berikut dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993; 172).

3. Peacock dan Wiseman

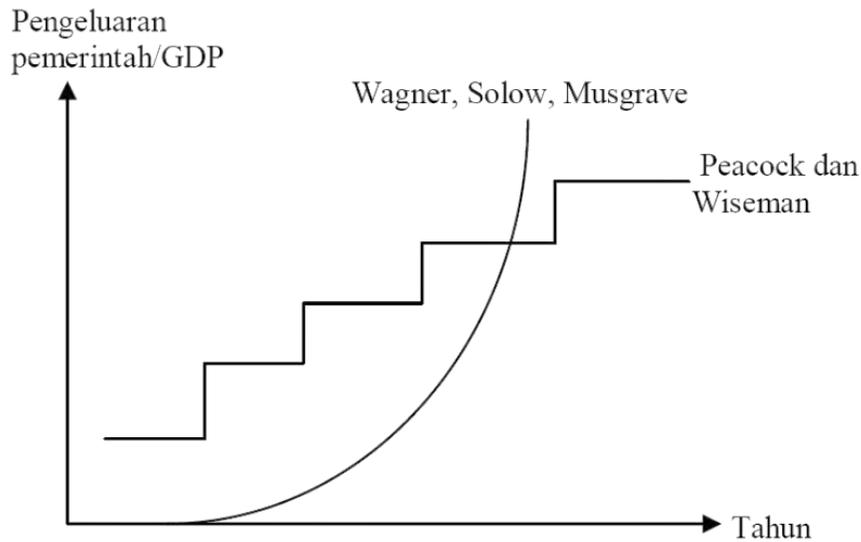
Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban

membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat.

Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut. Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala. Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja. Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karenanya pajak tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai.

Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelum perang.

Gambar 2.1
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah



Sumber: (Musgrave, 1993)

Dalam Mangkoesebroto (1993; 173) Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak.

2.2 Kebijakan Pemerintah Tentang Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah suatu cara yang dilakukan setiap negara dalam

mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu negara dengan negara lain dalam Kuncoro, (2014).

Dalam teori ekonomi publik dibahas mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Musgrave terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (*sentralisasi*) ataukah didesentralisasikan. Faktor yang pertama adalah *eksternalitas* dan uang, yang kedua ialah *preferensi* (Azwardi & Abukosim, 2007). Melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer, dan pinjaman daerah yang dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (Azwardi & Abukosim, 2007).

Di dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2013 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

A. Kebijakan Dana Desa

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. (www.Kemendes.go.id)

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

A. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh Pemda diteruskan ke masing - masing Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima:

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD;
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50%. Capaian *output* paling kurang sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

Penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku mulai tahun 2018. Untuk tahun 2017, ditentukan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan selanjutnya untuk Tahap II disampaikan ke KPPN.

Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sampai dengan bulan Juli dan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan

menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

B. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

a. Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

b. Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

c. Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

d. Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

e. Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

1. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
2. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (www.Kemendesa.go.id)

B. Kebijakan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus . Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Alokasi Dana Desa dipergunakan sebesar 30% nya untuk operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibagi seperti berikut: Belanja aparatur dan operasional pemerintah desan sebesar 25%, dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 5%. Kemudian, sisa dana desa sebesar 70% dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian: Sebesar 40% dipergunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang kegiatan desa, dan sebesar 30% dari Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk kegiatan kelembagaan desa.

C. Kebijakan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

Menurut Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yaitu:

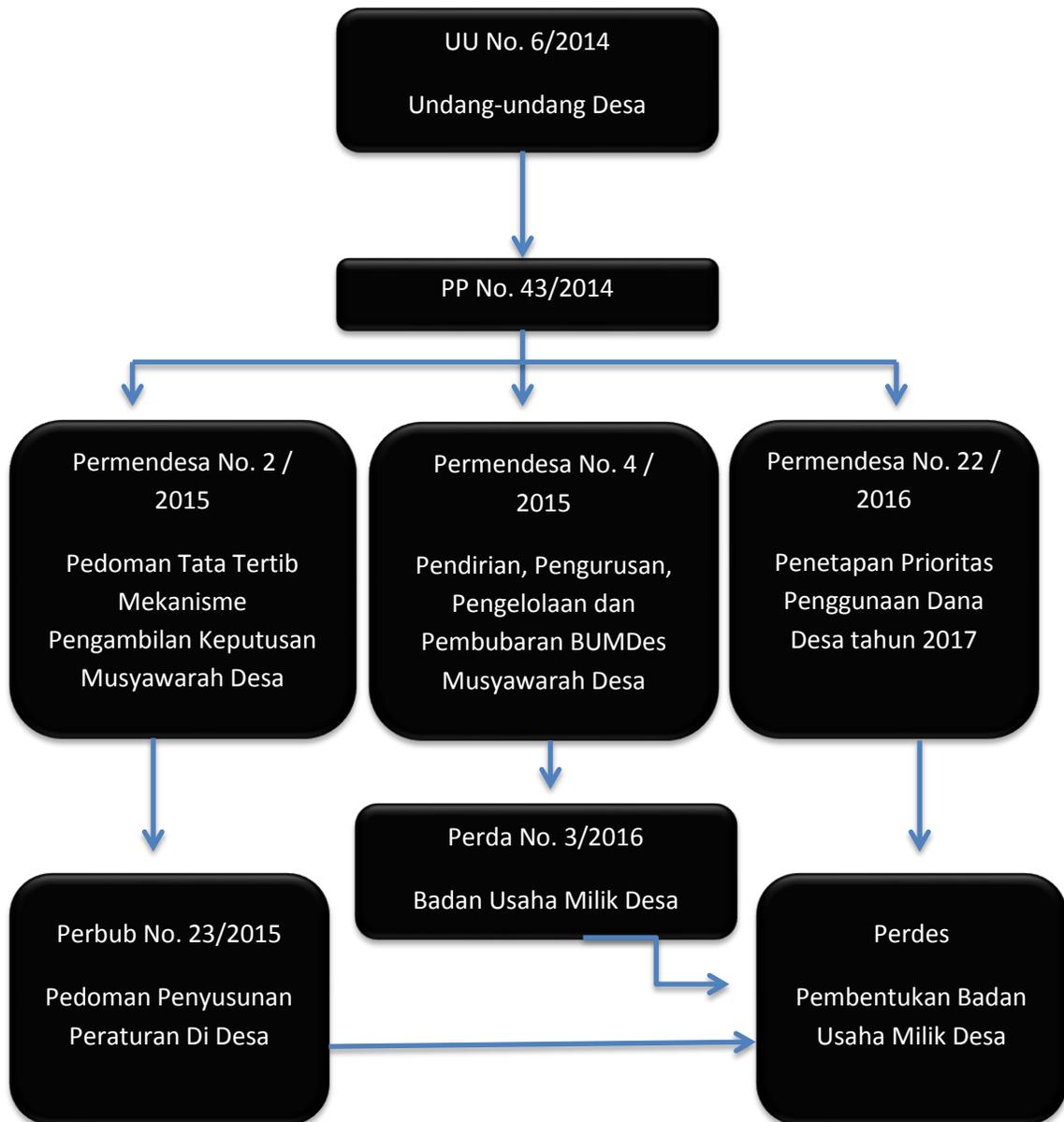
1. Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa
2. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes
3. Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes
4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Demikian pula halnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun di dalam Permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan

BUMDes diatur dalam peraturan menteri ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi Desa-desa yang selama ini sudah memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes.

Gambar 2.2
Regulasi BUMDes



Sumber: Buku Peta Jalan BUMDES sukses

2.3 Penelitian Terdahulu

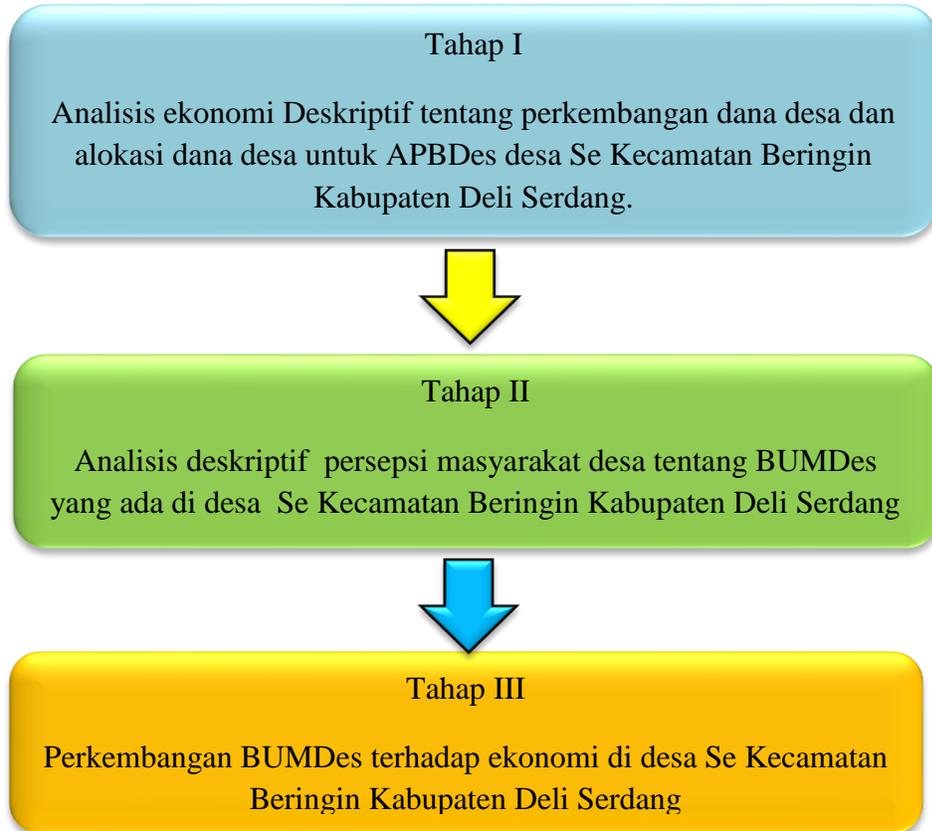
Tabel 2.1

Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Model Estimasi	Hasil Penelitian
Nugroho (2015) , Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung	BUMDes, Lembaga Keuangan Masyarakat(LKM), Rumah Tangga Miskin (RTM)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara Dampak program BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM)
Andriani Sari (2017) Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai	BUMDes , Pengembangan Ekonomi Desa (PED)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara perbedaan sebelum dan sesudah adanya BUMDes yang dihitung berdasarkan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMDes yang berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan.
Rigi Dian Rahmawati (2014) , Peran BUMDes dalam Perekonomian Masyarakat di Daerah	BUMDES, Indeks Kemandirian Desa(IKD)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara peran bumdes dalam

Pedesaan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora			kontribusi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Agung gunanto (2016), Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	BUMDes, Ekonomi kelembagaan, pembangunan desa mandiri, tata kelola	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menjelaskan kondisi BUMDes sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

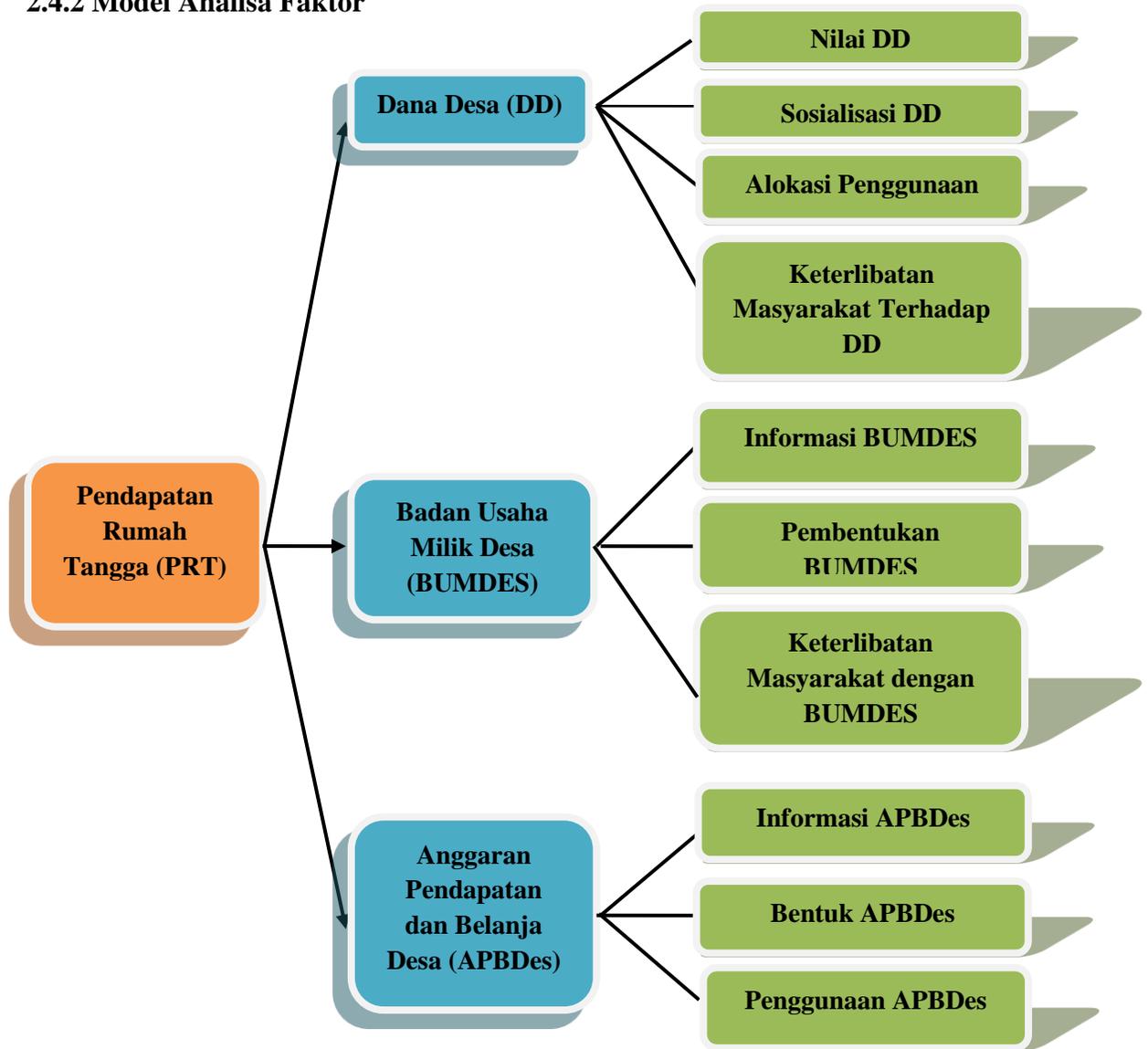
2.4 Kerangka Penelitian

2.4.1 Bagan Tahapan Penelitian



Gambar 2.3 Bagan Alur Penelitian

2.4.2 Model Analisa Faktor



Gambar 2.4 Bagan Konseptual Model

Dalam model ini, Variabel Dana Desa(DD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap Pendapatan Rumah Tangga seluruh Desa Se Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang yang merupakan variabel terikat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah . Penelitian deskriptif menurut Indriantoro (2010:88) menyatakan bahwa deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada, pengumpulan data melalui studi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah: Dana Desa (DD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Pendapatan Rumah Tangga (PRT) sehingga definisi operasional dari penelitian ini ialah:

Tabel 3.1

Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
PRT (Pendapatan Rumah Tangga)	Penghasilan yang diperoleh seluruh anggota rumah tangga	Responden
DD (Dana Desa)	Dana APBN untuk kegiatan desa dalam satuan miliar rupiah	Kementerian Desa PDDT www.kemendes.go.id
BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)	Lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa	Kantor Desa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	Sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam perencanaan pembangunan desa.	Kantor Desa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di seluruh desa di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

3.3.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2019.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kualitatif, data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Pada umumnya data kualitatif yang bersifat data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat. (Kuncoro, 2013)

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data orisinal (Kuncoro, 2013). Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. (Kuncoro, 2013)

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah masyarakat desa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 56.600 orang.

3.5.2 Sampel

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan ialah *Probability sampling*, pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (daerah) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*. *Simple Random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut. Jumlah populasi sebanyak 56.600 orang, rumus untuk menentukan sampel yaitu menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 15%

Maka :

$$n = N / (1 + N (e)^2) = 56.600 / (1 + 56.600 \times (0.15)^2) = 44$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka peneliti menetapkan anggota sampel yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah 44 orang dan desa yang di sampling hanya 2 desa yaitu desa Sidodadi Ramunia dan Sidourip. Kedua desa ini memiliki

potensi BUMDes yang dapat dikembangkan karena letak geografis, ekonomi, sosial serta ,lingkungannya yang tinggi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data primer yaitu yang diperoleh dari :

1. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen serta catatan-catatan untuk mendukung penelitian ini dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur-literatur berupa buku, makalah, dan jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Wawancara

Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat desa dan pemerintah desa yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Kuesioner

Teknik ini dilakukan dengan membagikan kuesioner dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan kepada responden secara langsung dan segera dikembalikan kepada peneliti.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Metode analisis yang digunakan pada pembahasan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah pembuktian dengan menggambarkan keadaan yang terjadi secara umum.

3.7.2 Analisis Faktor

A. Model Analisis Faktor

Secara matematis, analisis faktor hampir sama dengan regresi linier berganda, yaitu bahwa setiap variabel dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari faktor yang mendasari (*underlying factor*), jumlah (*amount*), yang tercakup dalam analisis disebut *communality*. Kovariansi antar variabel yang diuraikan, dinyatakan dalam *commons factors* yang sedikit jumlahnya ditambah dengan faktor yang unik untuk setiap variabel. Faktor-faktor ini tidak secara jelas terlihat (*not overtly observed*).

Tujuan dari analisis faktor adalah untuk menggambarkan hubungan-hubungan kovarian antara beberapa variabel yang mendasari tetapi tidak teramati, kuantitas random yang disebut faktor, vector random teramati X dengan P komponen, memiliki rata-rata μ dan matrik kovarian.

B. Metode Analisis Faktor

Metode analisis faktor merupakan jenis analisis yang digunakan untuk mengenali dimensi-dimensi pokok atau keteraturan dari sebuah fenomena. Tujuan umum dari analisis faktor adalah untuk meringkas kandungan informasi variabel dalam jumlah yang besar menjadi sebuah faktor yang lebih kecil. Analisis faktor dimulai dari menyusun suatu kelompok variabel baru berdasarkan hubungan sebagaimana ditunjukkan matriks korelasi. Pendekatan yang digunakan dalam analisis faktor adalah *principal component analysis*, yaitu analisis yang mentransformasikan sejumlah variabel ke dalam suatu variabel komposit baru, atau komponen utama (*principal component*) yang tidak berkorelasi satu sama lain. (Kuncoro, 2013)

Analisis faktor digunakan untuk penelitian awal di mana faktor-faktor yang mempengaruhi suatu variabel belum diidentifikasi secara baik (*explanatory research*). Selain itu, analisis faktor juga dapat digunakan untuk menguji validitas suatu rangkaian kuesioner. Sebagai gambaran, jika suatu indikator tidak mengelompok kepada variabelnya, tetapi malah mengelompok ke variabel yang lain, berarti indikator tersebut tidak valid.

Ghozali menjelaskan bahwa asumsi analisis faktor menghendaki bahwa matrik data harus memiliki korelasi yang cukup agar dapat dilakukan analisis faktor. Jika berdasarkan data visual tidak ada nilai korelasi yang di atas 0.30, maka analisis faktor tidak dapat dilakukan. Sebelum memasuki analisis faktor, lebih dahulu melakukan uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang layak dan baik digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat

menggunakan uji normal kolmogorov Smirnov. Jika $\text{Sig} > 0,005$ maka data berdistribusi normal namun sebaliknya jika $\text{Sig} < 0,005$ maka data berdistribusi tidak normal. Proses utama analisis faktor meliputi hal-hal berikut :

A. Uji *Determinant of Correlation Matrix*

Matrix korelasi dikatakan antara variabel saling terkait apabila determinan bernilai mendekati nilai 0. Hasil perhitungan menunjukkan nilai Uji *Determinant of Correlation Matrix* sebesar 0,06. Nilai ini mendekati 0, dengan mendekati matrik korelasi antara variabel saling terkait.

B. Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling (KMO)

Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling (KMO) adalah indeks perbandingan jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien korelasi parsialnya. Jika jumlah kuadrat koefisien korelasi parsial di antara seluruh pasangan variabel bernilai kecil jika dibandingkan dengan jumlah kuadrat koefisien korelasi, maka akan menghasilkan nilai KMO mendekati 1. Nilai KMO dianggap mencukupi jika lebih dari 0,5.

C. Bartlett Test of Sphericity

Uji Bartlett Test of Sphericity merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bahwa variabel-variabel tidak saling berkorelasi dalam populasi. Dengan kata lain, matriks korelasi populasi merupakan matriks identitas, setiap variabel berkorelasi dengan dirinya sendiri secara sempurna dengan ($r=1$) akan tetapi sama sekali tidak berkorelasi dengan lainnya ($r = 0$). Uji Bartlett bertujuan untuk mengetahui apakah matrik korelasi yang terbentuk itu berbentuk matriks identitas atau bukan. Dalam analisis faktor keterkaitan antar variabel sangat diperlukan, karena

tujuan dari analisis ini adalah menghubungkan suatu kumpulan variabel agar menjadi satu faktor saja. Bila matriks korelasi yang terbentuk adalah matriks identitas, berarti tidak ada korelasi antar variabel, sehingga analisis faktor tidak dapat dilakukan. Pengelompokan dilakukan dengan mengukur korelasi sekumpulan variabel dan selanjutnya menempatkan variabel-variabel yang berkorelasi tinggi dalam satu faktor, dan variabel-variabel lain yang mempunyai korelasi relative lebih rendah ditempatkan pada faktor lain. Analisis faktor digunakan dalam situasi:

1. Mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari atau faktor, yang menjelaskan korelasi antara suatu set variabel.
2. Mengenali dan mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak berkorelasi (*independen*) yang lebih sedikit jumlahnya untuk menggantikan suatu set asli yang saling berkorelasi di dalam analisis multivariate selanjutnya, misalnya analisis regresi ganda dan analisis diskriminan.
3. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting dari suatu set variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk dipergunakan di dalam analisis multivariate selanjutnya.

Prinsip utama analisis faktor adalah korelasi, maka asumsi-asumsi yang terkait dengan metode statistik korelasi:

- a. Besar korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat.
- b. Besar korelasi persial, korelasi antar dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain.
- c. Pengujian sebuah matrik korelasi diukur dengan besar Barlett Test Of Sphericity atau dengan Measure Sampling Adequacy (MSA).

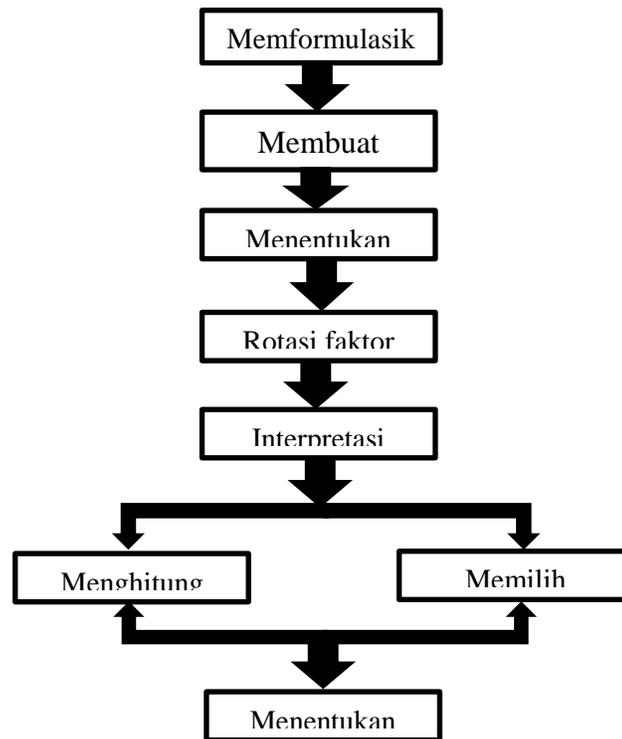
Setelah sampel didapat dan uji asumsi terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses analisis faktor. Proses tersebut meliputi:

- a. Menguji variabel apa saja yang akan dianalisis
- b. Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan menggunakan Barlett Test Of Sphericity dan MSA.
- c. Melakukan proses inti analisis faktor, yakni factoring, atau menurunkan satu atau lebih faktor dari variabel-variabel yang telah lolos pada uji variabel sebelumnya.
- d. Melakukan proses faktor rotasi terhadap faktor yang terbentuk. Tujuan rotasi untuk memperjelas variabel yang masuk ke dalam faktor tertentu.
- e. Interpretasi atau faktor yang telah terbentuk, yang dianggap bisa mewakili variabel-variabel anggota faktor tersebut.
- f. Validasi atau hasil faktor untuk mengetahui apakah faktor yang terbentuk telah valid.

Tahap pertama dalam analisis faktor adalah dengan menilai mana saja variabel yang dianggap layak untuk dimasukkan dalam analisis selanjutnya. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan semua variabel yang ada, dan kemudian pada variabel-variabel tersebut dikenakan sejumlah pengujian.

Logika pengujian adalah jika sebuah variabel memang mempunyai kecenderungan mengelompokkan atau membentuk sebuah faktor, variabel tersebut akan mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan variabel. Sebaliknya, variabel dengan korelasi lemah dengan variabel yang lain, akan cenderung tidak akan mengelompok dalam faktor tertentu.

Langkah-langkah dalam analisis faktor dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Bagan Analisis Faktor

Berdasarkan bagan diatas, secara garis besar analisis faktor dilakukan sebagai berikut :

1. Membuat Matriks Korelasi

Proses analisis didasarkan pada matriks korelasi antara variable yang satudengan variable yang lain, untuk memperoleh analisis faktor yang tepat semua variabel-variabelnya harus berkorelasi. Unutk menguju ketetapan dalam model faktor, uji statistik yang digunakan adalah test of sphericity da Kaiser-meyer-olkin (KMO).

2. Metode analisis faktor

Metode atau teknik analisis faktor yang digunakan untuk ekstraksi dalam analisis faktor adalah principal component analisis (PCA), yaitu merupakan pendekatan untuk analisis faktor yang menekankan pada pertimbangan total varianbel dalam data.

3. Penentuan jumlah faktor

Penentuan jumlah faktor yang diperlukan untuk mewakili variable-variabel yang akan dianalisis didasarkan pada besarnya nilai eigen value serta prosentasi total varian.

Pada analisis ini jumlah faktor sebelum penelitian ditentukan sebanyak tujuh faktor berdasarkan apriori dan hanya berlaku pada pembahasan sebelum penelitian. Setelah penelitian dilaksanakan untuk analisis selanjutnya didasarkan pada hasil analisis statistik dengan principal component analisis (PCA). Hanya faktor yang memiliki eigen value sama dengan atau lebih besar dari 1 (satu) yang dipertahankan dalam model analisi faktor, sedangkan yang lainnya dikeluarkan dari model.

4. Rotasi Faktor

Hasil dari ekstraksi faktor dalam matrik faktor mengindikasikan hubungan antara faktor dan variable individual namun dalam faktor-faktor tersebut terdapat banyak variabel yang berkorelasi, sehingga sulit diinterpretasikan. Melalui rotasi faktor matrik, matrik faktor ditransformasi ke dalam matrik yang lebih sederhana sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Rotasi faktor dengan menggunakan prosedur varimax.

5. Interpretasi faktor

Interprestasi faktor dilakukan dengan mengklasifikasikan variable yang mempunyai faktor loading yang tinggi ke dalam faktor yang bersangkutan. Untuk interprestasi hasil penelitian ini faktor loading minimum 0,50 variabel dengan faktor loading kurang dari 0,50 dikeluarkan dari model.

6. Model fit (ketepatan mode)

Tahap akhir dari analisis faktor adalah untuk mengetahui ketepatan dalam memilih teknik analisis faktor (*principal component analysis*). Untuk mengetahuinya dengan melihat jumlah residual (perbedaan) antara korelasi yang diamati dengan korelasi yang direproduksi, semakin kecil prosentasenya maka semakin tepat penentuan teknik tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di desa Se Kecamatan

Beringin Kabupaten Deli Serdang

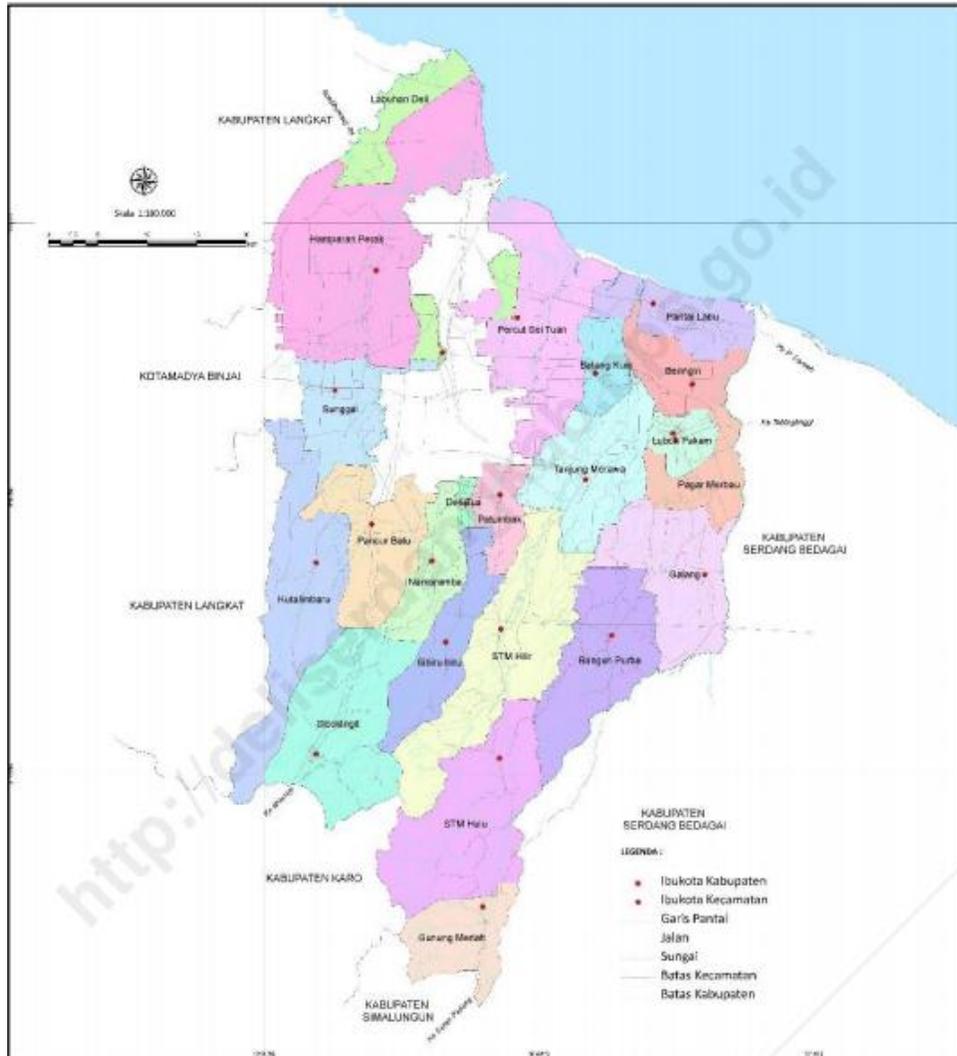
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang

Secara geografis, Kabupaten Deli Serdang berada pada 2°57' Lintang Utara sampai 3°16' Lintang Utara dan 98°33' Bujur Timur sampai 99°27' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Deli Serdang memiliki luas 2.497,72 km². Batas area disebelah utara adalah Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo.

Kabupaten Deli Serdang adalah daerah yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya di tandai dengan jumlah hari hujan pada tiap bulan terjadinya musim. Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan dan 394 desa/kelurahan. Kecamatan tersebut antara lain adalah Gunung Meriah, Sinembah Tanjung Muda Hulu, Sibolangit, Kuta limbaru, Pancur Batu, Biru-Biru, Sinembah Tanjung Muda Hilir, Bangun Purba, Galang, Tanjung Morawa, Patumbak, Deli Tua, Sunggal , Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Batang Kuis , Pantai Labu, Beringin, Lubuk Pakam, dan Pagar Merbau.

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2017

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Beringin

Kecamatan Beringin terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah 54,32 km² dan letak wilayah 3^o54' - 3^o62' Lintang Utara, 98^o83' - 98^o88' Bujur Timur yang terdiri dari 11 Desa yaitu: Beringin, Sidodadi,

Pasar Lima Kebun Kelapa, Karang Anyar, Aras Kabu, Emplasman Kualanamu, Tumpatan, Sidourip, Pasar Enam Kualanamu, Sidoarjo II Ramunia dan Serdang.

Gambar 4.2

Peta Wilayah Kecamatan Beringin



S

umber: Kantor Kecamatan Beringin, 2019

Kecamatan Beringin dari permukaan laut $\pm 8 - 17$ meter, adapun batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pantai Labu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Pakam, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pagar Merbabu dan Kabupaten Serdang, sebelah barat berbatasan dengan Tanjung Morawa dan Kecamatan Batang Kuis.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Di Kecamatan Beringin 2018

No	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
1	Beringin	8370	1618
2	Sidodadi Ramunia	12895	3355
3	Psr V Kebun Kelapa	5918	1803
4	Karang Anyar	7888	1961
5	Aras Kabu	3618	929
6	Sidourip	2494	716
7	Emplasman Kualanamu	2214	620
8	Tumpatan	6439	1646
9	Psr VI Kualanamu	497	234
10	Sidoarjo II Ramunia	3776	879
11	Serdang	2491	596
	Total	56600	14357

Sumber: Kantor Kecamatan Beringin, 2018

Penduduk kecamatan beringin pada saat ini berjumlah 56.600 jiwa dan jumlah kepala keluarga 14.357 KK. Dimana rumah tangga yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama, dengan satu sama lainnya hidup harmonis serta mampu memelihara adat istiadatnya masingmasing di kecamatan tersebut.

Komposisi mata pencaharian penduduk Kecamatan Beringin pada umumnya di bidang pertanian. Secara umum dapat dilihat bahwa penduduk kecamatan beringin mempunyai mata pencaharian terdiri atas Pertanian, Buruh/ karyawan, Perdagangan, Nelayan, PNS/ TNI/ POLRI, Industri, dan lain-lain. Agama Islam, : 46.048 Jiwa, Agama kristen Protestan: 6.365 Jiwa, Agama Kristen Katolik: 663 Jiwa, Agama Budha: 1.002 Jiwa.

4.1.3 Perkembangan Dana Desa di Desa Se Kecamatan Beringin

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa, dalam melaksanakan program-program dana desa sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan desa melalui potensi geografis, ekonomi, sosial serta lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa

ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap.

Kementerian Keuangan Indonesia memberikan kebijakan transfer dana daerah berupa Dana Desa yang dilakukan secara merata baik penyebarannya maupun besarnya di seluruh Indonesia tergolong kurang efektif dan masih ada penyalahgunaan transfer dana daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum politisi bahkan kepala daerah. Dengan adanya perbedaan karakteristik luas wilayah, jumlah penduduk, serta angka kemiskinannya dan keadaan perekonomian di setiap desa mengidentifikasi kurang efektifnya penyaluran dana desa. Setiap desa di Kecamatan Beringin memiliki kebutuhannya masing-masing, contohnya saja keadaan desa yang maju dengan keadaan desa yang sedang berkembang jauh berbeda dan APBDesnya juga pasti berbeda. Di desa yang sedang membutuhkan sokongan dana desa yang lebih, guna meningkatkan keadaan perekonomian di desa Se Kecamatan Beringin.

Dana desa yang disalurkan di Kecamatan Beringin berbeda-beda jumlah dananya setiap desa sesuai dengan tingkat kesulitan letak geografisnya, jumlah penduduknya, luas wilayah serta angka kemiskinannya. Adapun jumlah dana desa yang ada di desa Se Kecamatan Beringin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Data Jumlah Dana Desa Se Kecamatan Beringin 2015-2018

No	Desa	Dana Desa (DD)			
		2015	2016	2017	2018

1	Beringin	281310000	644043000	821227000	688956000
2	Sidodadi Ramunia	294937000	660472000	842333000	832365000
3	Psr V Kebun Kelapa	278115000	624237000	795674000	688230000
4	Karang Anyar	292654000	665554000	835901000	746106000
5	Aras Kabu	281701000	631961000	805530000	700172000
6	Sidourip	270717000	608299000	775213000	668368000
7	Emplasman Kualanamu	274848000	617198000	786681000	663355000
8	Tumpatan	287800000	645099000	822160000	693450000
9	Psr VI Kualanamu	272781000	612746000	780951000	670429000
10	Sidoarjo II Ramunia	272721000	612618000	780867000	698471000
11	Serdang	280029000	628358000	800996000	780867000
	Total	3087613000	6950585000	8847533000	7830769000

Sumber : Kantor Desa Se Kecamatan Beringin, 2019

Berdasarkan tabel diatas, jumlah dana desa dari tahun 2015-2018 di desa Se Kecamatan Beringin mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017 sebesar Rp 3.087.613.000 milyar menjadi Rp 8.847.533.000 milyar , sedangkan 2018 dana desa yang ada di desa Se Kecamatan Beringin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 7.830.769.000 milyar rupiah. Penurunan ini diakibatkan tidak maksimalnya penggunaan dana desa yang ada di desa Se Kecamatan Beringin. Selain itu jumlah dana desa setiap desa di Kecamatan Beringin berbeda-beda sesuai dengan kriteria desanya masing-masing. Dana desa ini digunakan untuk melakukan

pembangunan desa khususnya di desa Se Kecamatan Beringin yaitu menunjang aktivitas masyarakat desa di Kecamatan Beringin seperti pembangunan jalan desa, jembatan, pasar desa, embung, irigasi, sarana olahraga dan BUMDes. Selain itu juga dana desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa di Kecamatan Beringin seperti membangun polindes, air bersih, Mck, Paud, Drainase, dan Penahan Tanah. Jadi penggunaan dana desa setiap tahun dari tahun 2015 sampai 2018 di desa Se Kecamatan Beringin berbeda-beda sesuai dengan yang di butuhkan setiap desa, seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, prasarana transportasi umum, jembatan, teknologi dan lain sebagainya. Adapun penyaluran Dana Desa ini adalah untuk pengembangan ekonomi pedesaan melalui BUMDes.

4.1.4 Perkembangan Alokasi Dana Desa di desa Se Kecamatan Beringin

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640 SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk desa. Melalui Alokasi Dana Desa (ADD), desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa merupakan dana

yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Berikut data jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan ke desa Se Kecamatan Beringin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Jumlah Alokasi Dana Desa Se Kecamatan Beringin 2015-2018

No	Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)			
		2015	2016	2017	2018
1	Beringin	389919000	388758000	392201000	448689000
2	Sidodadi Ramunia	492820000	495422000	528221000	715391000
3	Psr V Kebun Kelapa	340292000	340094000	342045000	406018000
4	Karang Anyar	426788000	426664000	464461000	551199000
5	Aras Kabu	339900000	339729000	408725000	395933000
6	Sidourip	310990000	313815000	317689000	369496000
7	Emplasman Kualanamu	302534000	301305000	294201000	332443000
8	Tumpatan	403542000	404271000	412271000	469071000
9	Psr VI Kualanamu	309088000	310823000	367021000	353332000
10	Sidoarjo II Ramunia	394949000	402897000	439920000	525333000
11	Serdang	359459000	362813000	382992000	439920000
	Total	4070281000	4086591000	4349747000	5006825000

Sumber : Kantor Desa Se Kecamatan Beringin, 2019

Berdasarkan tabel data diatas, bahwasannya ADD yang disalurkan setiap tahunnya berbeda-beda setiap desanya. Adapun program Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Kecamatan Beringin adalah untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa, untuk biaya operasional BPD, untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa, untuk bantuan modal usaha desa, untuk bantuan biaya operasional desa, untuk bantuan operasional PKK, unuk bantuan operasional posyandu, untuk, bantuan pengembangan sosial budaya, keagamaan, dan pembinaan generasi muda, dana bantuan penyaluran raskin desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini melalui pembangunan fisik dan non fisik.

Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan di seluruh kantor desa Se Kecamatan Beringin menunjukkan bahwasannya keakuntabilitan dan keterbukaan tentang pengalokasian Dana Desa masih sangat kurang, dikarenakan hanya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kantor desa Se Kecamatan Beringin saja yang hanya mengetahui besaran pengalokasian Dana Desa serta pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Sebaliknya masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor desa sangat kurang paham tentang Alokasi Dana Desa tersebut. Mereka hanya mengetahui apa-apa saja yang dibangun karena dalam bentuk fisik yang terlihat dimata.

Minimnya informasi tentang pengalokasian Dana Desa di sebabkan oleh pemerintah dan aparat desa menginformasikannya hanya melalui musyawarah desa dan hanya di hadiri oleh perwakilannya saja, serta melampirkan baliho atau spanduk yang itu hanya terpasang di kantor desa saja, tidak ada baliho atau spanduk yang

terpasang di beberapa kantor desa. Maka dari itu minimnya pengetahuan dan keikutsertaan masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa dapat mengindikasikan terjadinya penyelewengan anggaran Dana Desa.

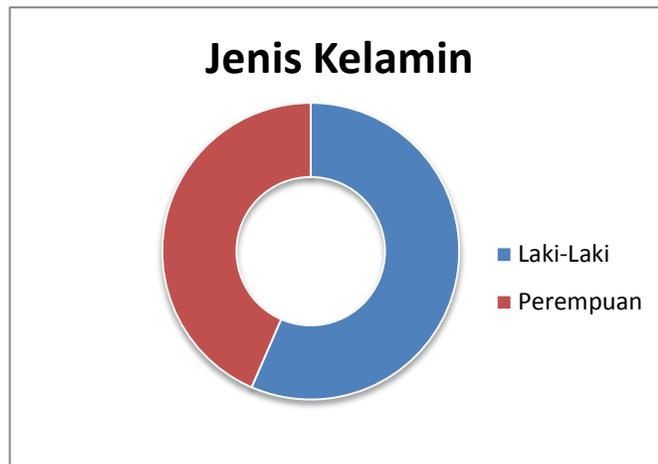
4.2. Persepsi Masyarakat Desa Tentang BUMDes Yang Ada Di Desa Se Kecamatan Beringin

4.2.1 Deskriptif Data

Responden yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah , Masyarakat desa Sidourip dan Sidodadi mengenai BUMDes. Responden yang digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 45 orang. Melalui kuesioner maka di peroleh daftar data responden wanita-pria, usia yang berbeda, tingkat pendidikan dan pekerjaan serta melakukan pendidikan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah penjelasan dan analisis mengenai hasil jawaban kuesioner dan juga gambaran responden yang menjawab kuesioner.

Table 4.4
Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	25	55.6	55.6	55.6
	PEREMPUAN	20	44.4	44.4	100.0
	Total	45	100.0	100.0	



Gambar 4.3

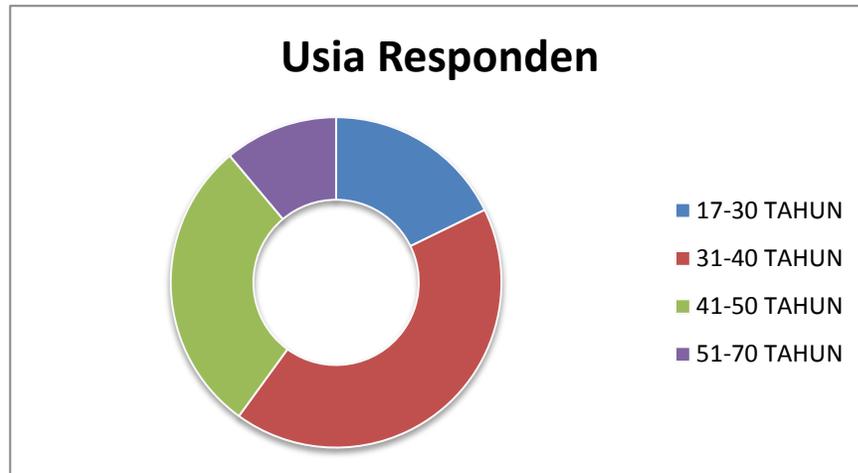
Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil survey yang diperoleh dari 45 responden sekitar 25 % responden berjenis kelamin laki-laki atau berjumlah 25 orang, serta sebesar 20 % responden berjenis kelamin perempuan atau berjumlah 20 responden berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.5

Usia Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-30 TAHUN	8	17.8	17.8	17.8
	31-40 TAHUN	19	42.2	42.2	60.0
	41-50 TAHUN	13	28.9	28.9	88.9
	51-70 TAHUN	5	11.1	11.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	



Gambar 4.4

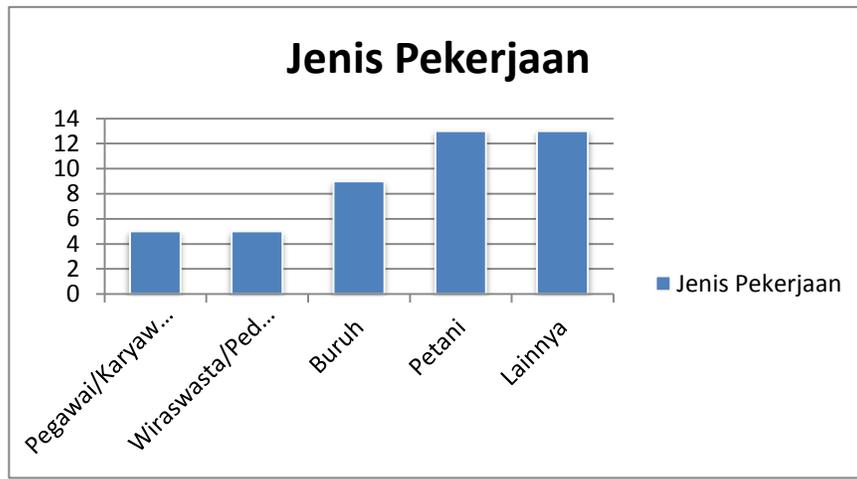
Usia Responden

Berdasarkan tabel diatas dari 45 responden yang tersebar di Kota Medan maka diperoleh bahwasanya sebanyak 8 responden berusia 17-30 tahun, 19 responden berusia 31-40 tahun, 13 responden berusia 41-50 tahun dan 5 responden berusia 51-70 tahun. Adapun teknik menentukan responden menggunakan metode acak tanpa harus ditentukan jumlah mewakili masing-masing usia responden.

Tabel 4.6

Jenis Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PEGAWAI/KARYAWAN	5	11.1	11.1	11.1
	WIRASWASTA/PEDAGANG	5	11.1	11.1	22.2
	BURUH	9	20.0	20.0	42.2
	PETANI	13	28.9	28.9	71.1
	LAINNYA	13	28.9	28.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	



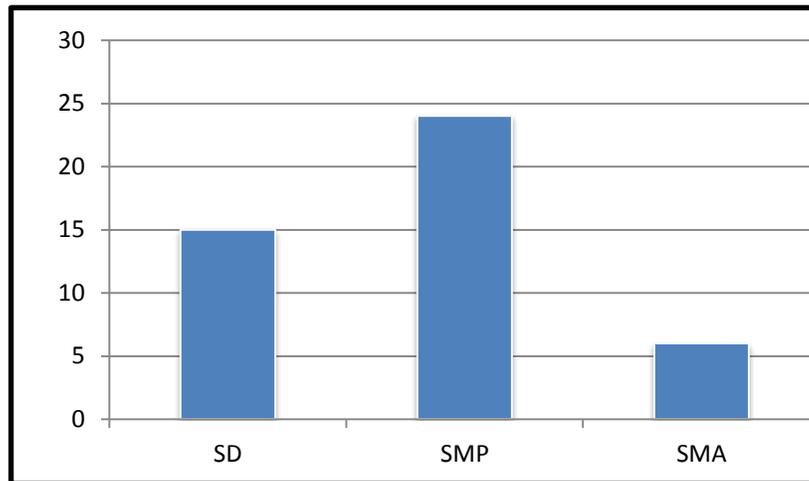
Gambar 4.5

Jenis Pekerjaan

Selanjutnya berdasarkan data diatas pada jenis pekerjaan untuk Pegawai/Karyawan sebanyak 5 orang, untuk Wiraswasta/Pedagang sebanyak 5 orang, untuk pekerjaan Buruh sebanyak 9, untuk Petani sebanyak 13 orang dan pekerjaan lainnya sebanyak 13 orang.

Tabel 4.7
Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	15	33.3	33.3	33.3
	SMP	24	53.3	53.3	86.7
	SMA	6	13.3	13.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	



Gambar 4.6

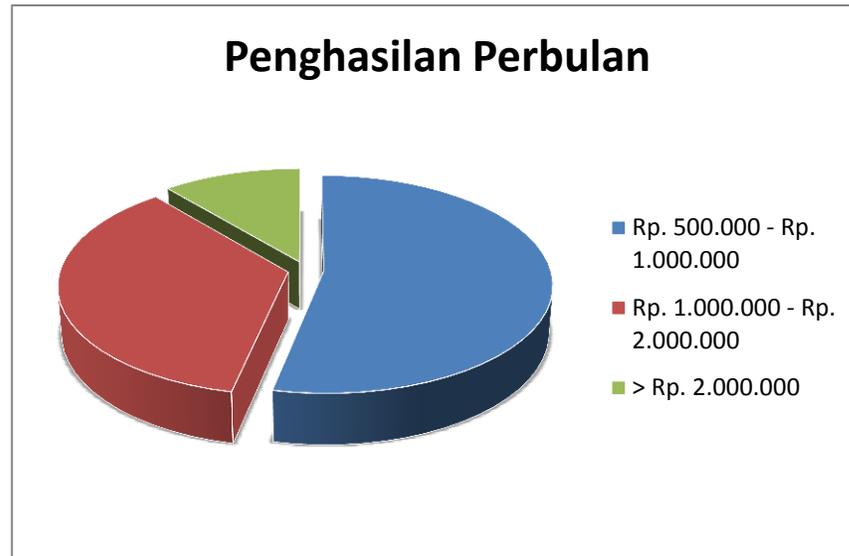
Pendidikan

Selanjutnya berdasarkan data diatas pada tingkat pendidikan responden terdapat 15 orang tamatan SD, 24 orang tamatan SMP dan 6 orang tamatan SMA.

Tabel 4.8

Penghasilan perbulan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000	24	53.3	53.3	53.3
Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000	16	35.6	35.6	88.9
> Rp. 2.000.000	5	11.1	11.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	



Gambar 4.7

Penghasilan

berdasarkan data diatas pada tingkat penghasilan responden perbulannya adalah Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 sebanyak 24 orang, untuk berpenghasilan Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 sebanyak 16 orang dan untuk berpenghasilan > RP 2.000.000 sebanyak 5 orang.

4.2.2 Pembahasan uji validitas dan reabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah prosedur untuk memastikan valid atau tidaknya data penelitian. Berikut ini adalah hasil pengujian validitas penelitian:

Tabel 4.9

Uji Validitas

No Item		Jumlah	Keterangan
SB1	Pearson Correlation	.329*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.027	

	N	45	
SB2	Pearson Correlation	.364*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.014	
	N	45	
SB3	Pearson Correlation	0.359*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.016	
	N	45	
SB4	Pearson Correlation	0.388*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.016	
	N	45	
SB5	Pearson Correlation	.365*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.014	
	N	45	
SB6	Pearson Correlation	0.055	Tidak Valid
	Sig. (2-tailed)	0.722	
	N	45	
SPB7	Pearson Correlation	.355*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.017	
	N	45	
SPB8	Pearson Correlation	.523*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	45	
SPB9	Pearson Correlation	.288	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.055	
	N	45	
SPB10	Pearson Correlation	.512**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	45	
PB11	Pearson Correlation	.445**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.002	
	N	45	
PB12	Pearson Correlation	.516**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	45	
PB13	Pearson Correlation	.540**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	45	
PB14	Pearson Correlation	.387**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.009	
	N	45	
PB15	Pearson Correlation	0.289	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.054	
	N	45	

PB16	Pearson Correlation	.356*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.016	
	N	45	
PB17	Pearson Correlation	.371*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.012	
	N	45	
PB18	Pearson Correlation	.410**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.005	
	N	45	
PB19	Pearson Correlation	.367*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.013	
	N	45	
KM20	Pearson Correlation	.867**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	45	
KM21	Pearson Correlation	.870**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	45	
KM22	Pearson Correlation	.869**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	87	
KM23	Pearson Correlation	.861**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	45	
KM24	Pearson Correlation	.840**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	87	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil pengujian validitas diketahui bahwa dari 24 butir pertanyaan untuk mengungkap tentang persepsi masyarakat desa tentang BUMDes yang ada di desa Se Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dinyatakan valid. Berdasarkan hal itu maka untuk melakukan analisis persepsi masyarakat desa tentang BUMDes yang ada di desa Se Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang digunakan 24 variabel.

2. Uji Reliabilitas

Hasil Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui sejauh mana suatu hasil pengukuran tetap konsisten. Pada uji reliabilitas, pengukuran kuisioner dapat dikatakan reliabel apabila Cronbach's Alpha mempunyai nilai lebih dari 0,6.

Tabel 4.10

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.953	24

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alpha dari seluruh item pertanyaan yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian ini masih berada di atas *cut of value* > 0,60. Ini berarti bahwa semua item pertanyaan yang dijadikan sebagai instrument dapat dipercaya keandalannya. Dari hasil reliabilitas instrumen penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan yang digunakan adalah reliabel.

4.2.3 Pembahasan Analisa Faktor

Analisis faktor eksploratori atau analisis komponen utama (PCA = *principle component analysis*) yaitu suatu teknik analisis faktor di mana beberapa faktor yang akan terbentuk berupa variabel laten yang belum dapat ditentukan sebelum analisis dilakukan. Proses analisis faktor eksploratori mencoba untuk menemukan hubungan antarvariabel baru atau faktor yang terbentuk yang saling independen sesamanya, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel laten atau faktor yang

lebih sedikit dari jumlah variabel awal yang bebas atau tidak berkorelasi sesamanya. Jadi antar faktor yang terbentuk tidak berkorelasi sesamanya.

1. Matriks Korelasi (KMO)

24 variabel yang diuji, dimasukkan ke analisis faktor untuk di uji nilai KMO dan Bartlett Test dan MSA (*measures of sampling adequacy*), nilai MSA harus diatas 0,5. Berikut n adalah tabel dari hasil KMO dan Bartlett Test.

Tabel 4.11

KMO and Bartlett's Test

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.808
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1097.734
	Df	276
	Sig.	.000

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa nilai KMO menunjukkan 0,808 dengan taraf signifikan 0,000. Pada tabel tersebut, nilai KMO lebih besar dari 0,5 maka analisis faktor tepat untuk digunakan atau dapat dikatakan data tersebut memenuhi syarat kecukupan sampling dan dapat diteliti lebih lanjut.

2. Uji MSA (*Measure of Sampling Adequacy*)

Uji MSA digunakan untuk mengukur kecukupan sampling pada setiap indikatornya. Apabila MSA memiliki nilai kurang dari 0,5 maka pernyataan tersebut tidak dapat dianalisis lebih lanjut dan harus dikeluarkan, sedangkan untuk MSA lebih dari 0,5 maka dapat dianalisis lebih lanjut.

Tabel 4.12**Uji MSA (*Measure of Sampling Adequacy*)**

No.	Variabel	Nilai <i>Measure of Sampling Adequacy</i> (MSA)
1	SB1	.823 ^a
2	SB2	.802 ^a
3	SB3	.881 ^a
4	SB4	.846 ^a
5	SB5	.835 ^a
6	SB6	.850 ^a
7	SPB7	.879 ^a
8	SPB8	.917 ^a
9	SPB9	.784 ^a
10	SPB10	.886 ^a
11	PB11	.773 ^a
12	PB12	.908 ^a
13	PB13	.862 ^a
14	PB14	.781 ^a
15	PB15	.752 ^a
16	PB16	.683 ^a
17	PB17	.767 ^a
18	PB18	.756 ^a
19	PB19	.751 ^a
20	KM20	.762 ^a
21	KM21	.856 ^a
22	KM22	.727 ^a
23	KM23	.661 ^a
24	KM24	.689 ^a

Berdasarkan tabel diatas dari 24 indikator, yang memiliki nilai MSA lebih dari 0,5 adalah semua indikator. Jadi, semua indikator dinyatakan valid dan tidak ada yang dikeluarkan.

3. Ekstraksi Faktor

Uji *Communalities* berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar indikator dapat menjelaskan faktor. Semakin besar nilai dari tiap-tiap indikator pada *communalities* berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk.

Tabel 4.13
Uji Communalitas

	Initial	Extraction
SB1	1.000	.847
SB2	1.000	.907
SB3	1.000	.851
SB4	1.000	.803
SB5	1.000	.777
SB6	1.000	.314
SPB7	1.000	.809
SPB8	1.000	.866
SPB9	1.000	.637
SPB10	1.000	.809
PB11	1.000	.601
PB12	1.000	.688
PB13	1.000	.772
PB14	1.000	.786
PB15	1.000	.808
PB16	1.000	.617
PB17	1.000	.620
PB18	1.000	.801
PB19	1.000	.765
KM20	1.000	.768
KM21	1.000	.741
KM22	1.000	.761
KM23	1.000	.772
KM24	1.000	.765

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Untuk indikator Sosialisasi BUMDes pertanyaan yang nomor 1 bernilai sebesar 0,847 yang artinya indikator Sosialisasi BUMDes pertanyaan yang nomor 1 yaitu Tahukah anda tentang BUMDes dapat menjelaskan faktor sebesar 84,7 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi BUMDes pertanyaan yang nomor 2 bernilai sebesar 0,907 yang artinya indikator Sosialisasi BUMDes pertanyaan yang nomor 2 yaitu Tahukah anda tentang jenis usaha BUMDes di Desa ini dapat menjelaskan faktor sebesar 90,7 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi BUMDes pertanyaan yang nomor 3 bernilai sebesar 0,851 yang artinya indikator Sosialisasi BUMDes pertanyaan yang nomor 3 yaitu Masyarakat desa ikut terlibat dalam kegiatan BUMDes dapat menjelaskan faktor sebesar 85,1 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi BUMDes pertanyaan yang nomor 4 bernilai sebesar 0,803 yang artinya indikator Sosialisasi BUMDes pertanyaan 4 yaitu Pemerintah desa melakukan Sosialisasi BUMDes kepada masyarakat dapat menjelaskan faktor sebesar 80,3 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi BUMDes pertanyaan yang nomor 5 bernilai sebesar 0,777 yang artinya indikator Sosialisasi BUMDes pertanyaan yang nomor 5 yaitu BUMDes membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa dapat menjelaskan faktor sebesar 77,7 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi BUMDes pertanyaan yang nomor 6 bernilai sebesar 0,314 yang artinya indikator Sosialisasi BUMDes pertanyaan yang nomor 6 yaitu BUMDes menerima hasil usaha masyarakat desa untuk dikelola dan di

pasarkan dapat menjelaskan faktor sebesar 31,4 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan nomor 7 bernilai sebesar 0,809 yang artinya indikator Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan nomor 7 yaitu Tahukah anda pembentukan BUMDes di desa ini dapat menjelaskan faktor sebesar 80,9 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan nomor 8 bernilai sebesar 0,866 yang artinya indikator Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan nomor 8 yaitu Pemerintah desa melakukan sosialisasi pembentukan BUMDes dengan masyarakat dapat menjelaskan faktor sebesar 86,6 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan nomor 9 bernilai sebesar 0,637 yang artinya indikator Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan nomor 9 yaitu Tahukah tujuan dibentuknya BUMDes di desa ini dapat menjelaskan faktor sebesar 63,7 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan nomor 10 bernilai sebesar 0,809 yang artinya indikator Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan nomor 10 yaitu Tahukah anda Pembentukan BUMDes harus sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa dapat menjelaskan faktor sebesar 80,9 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 11 bernilai sebesar 0,601 yang artinya indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 11 yaitu BUMDes dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dapat menjelaskan faktor sebesar 60,1 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 12 bernilai sebesar 0,688 yang artinya indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 12 yaitu BUMDes dapat meningkatkan Sumber daya manusia (SDM) dapat menjelaskan faktor sebesar 68,8 % dari seluruh faktor

yang terbentuk. Indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 13 bernilai sebesar 0,772 yang artinya indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 13 yaitu Penyelenggara unit usaha BUMDes memberikan pelayanan yang sama kepada semua masyarakat dapat menjelaskan faktor sebesar 77,2 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 14 bernilai sebesar 0,786 yang artinya indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 14 yaitu Masyarakat bebas menyuarakan pendapat mengenai pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara unit usaha BUMDes dapat menjelaskan faktor sebesar 78,6 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 15 bernilai sebesar 0,808 yang artinya indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 15 yaitu BUMDes dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat menjelaskan faktor sebesar 80,8 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 16 bernilai sebesar 0,617 yang artinya indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 16 yaitu BUMDes dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dapat menjelaskan faktor sebesar 61,7 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 17 bernilai sebesar 0,620 yang artinya indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 17 yaitu Penyerapan tenaga kerja semakin meningkat dengan adanya BUMDes dapat menjelaskan faktor sebesar 62,0 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 18 bernilai sebesar 0,801 yang artinya indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 18 yaitu BUMDes membantu pengembangan potensi desa dapat menjelaskan faktor sebesar 80,1 % dari seluruh faktor yang terbentuk. . Indikator Peran BUMDes pertanyaan nomor 19 bernilai sebesar 0,765 yang artinya indikator Peran BUMDes

pertanyaan nomor 19 yaitu BUMDes sangat penting dalam pengembangan ekonomi desa dapat menjelaskan faktor sebesar 76,5 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Keterlibatan masyarakat pertanyaan nomor 20 bernilai sebesar 0,768 yang artinya indikator Keterlibatan masyarakat pertanyaan nomor 20 yaitu Masyarakat desa diperbolehkan terlibat dalam kegiatan BUMDes dapat menjelaskan faktor sebesar 76,8 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Keterlibatan masyarakat pertanyaan nomor 21 bernilai sebesar 0,741 yang artinya indikator Keterlibatan masyarakat pertanyaan nomor 21 yaitu BUMDes harus dikelola oleh masyarakat desa langsung dapat menjelaskan faktor sebesar 74,1 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Keterlibatan masyarakat pertanyaan nomor 22 bernilai sebesar 0,761 yang artinya indikator Keterlibatan masyarakat pertanyaan nomor 22 yaitu Masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam pembentukan BUMDes dapat menjelaskan faktor sebesar 76,1 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Keterlibatan masyarakat pertanyaan nomor 23 bernilai sebesar 0,772 yang artinya indikator Keterlibatan masyarakat pertanyaan nomor 23 yaitu Masyarakat desa diperbolehkan menyampaikan ide dan gagasannya untuk mengembangkan unit usaha BUMDes dapat menjelaskan faktor sebesar 77,2 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Keterlibatan masyarakat pertanyaan nomor 24 bernilai sebesar 0,765 yang artinya indikator Keterlibatan masyarakat pertanyaan nomor 24 yaitu Pemerintah desa memberikan pelatihan tentang BUMDes kepada masyarakat desa dapat menjelaskan faktor sebesar 76,5 % dari seluruh faktor yang terbentuk.

4. Total Variance Explained

Pada penelitian ini proses ekstraksi yang digunakan yaitu menggunakan metode PCA (Principal Component Analysis). Faktor-faktor yang mempunyai nilai eigenvalues kurang dari 1 maka tidak mempunyai anggota variabel pembentuk faktor, kemudian apabila nilai eigenvalues lebih besar dari 1 maka termasuk suatu faktor yang signifikan.

Tabel 4.14

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	11.875	49.480	49.480	11.875	49.480	49.480	7.092	29.552	29.552
2	2.796	11.651	61.131	2.796	11.651	61.131	4.301	17.921	47.473
3	1.856	7.733	68.864	1.856	7.733	68.864	3.325	13.852	61.325
4	1.358	5.658	74.523	1.358	5.658	74.523	3.167	13.198	74.523
5	.957	3.987	78.510						
6	.880	3.667	82.176						
7	.822	3.426	85.602						
8	.660	2.749	88.351						
9	.538	2.242	90.594						
10	.457	1.906	92.499						
11	.326	1.358	93.858						
12	.250	1.042	94.900						
13	.213	.889	95.788						
14	.208	.866	96.654						
15	.172	.718	97.373						
16	.162	.676	98.049						
17	.125	.523	98.572						
18	.095	.397	98.968						
19	.074	.308	99.277						
20	.055	.230	99.507						

21	.043	.180	99.686					
22	.032	.135	99.821					
23	.027	.113	99.934					
24	.016	.066	100.000					

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Berdasarkan tabel *Total Variance Explained*, menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang terbentuk dan 20 faktor yang tidak terbentuk atau faktor yang tidak signifikan yaitu tidak memenuhi syarat dari *Principal component analysis* (PCA) dapat dilihat dari nilai *eigenvalues* yang harus diatas 1 untuk membentuk faktor. Pada komponen 1 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 11.875, dan pada komponen 2 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 2.796. dan pada komponen 3 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 1.856. dan pada komponen 4 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 1.358.

Pada komponen 5 sampai 24 tidak memiliki nilai diatas 1. Jadi komponen 5 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,957. komponen 6 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,880, komponen 7 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,822, komponen 8 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,660, komponen 9 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0.538, komponen 10 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,457, komponen 11 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,326, komponen 12 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,250, komponen 13 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0.213, komponen 14 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,208 komponen 15 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,172, komponen 16 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,162, komponen 17 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,125, komponen 18 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,095, komponen 19 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,074, komponen 20

terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,55, komponen 21 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,043, komponen 22 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,032, komponen 23 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,027, komponen 24 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,016.

4. Faktor Loading

Pengelompokkan variabel ke dalam faktor dapat ditentukan berdasarkan dari nilai factor loading yang menunjukkan besarnya korelasi pada masing-masing indikator dengan faktor yang dibentuk. Loading factor yang memiliki nilai terbesar berarti dapat menjelaskan bahwa indikator tersebut menjadi satu keanggotaan kelompok faktor yang terbentuk.

Tabel 4.15

Faktor Loading

Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
SB1	.836	-.346	-.016	-.167
SB2	.848	-.294	.136	-.289
SB3	.830	-.319	-.038	-.244
SB4	.808	-.202	.160	-.290
SB5	.811	-.267	.007	-.221
SB6	.421	-.368	-.001	-.031
SPB7	.849	-.290	-.062	.027
SPB8	.846	-.132	-.361	-.060
SPB9	.613	-.215	-.423	.190
SPB10	.797	-.108	-.401	-.038
PB11	.725	-.053	-.194	.188
PB12	.802	.036	.011	.208
PB13	.723	.215	.206	.402

PB14	.657	.111	.487	.324
PB15	.599	-.100	-.235	.619
PB16	.680	-.058	.099	.375
PB17	.745	-.157	.153	-.129
PB18	.670	.065	.575	-.133
PB19	.492	.231	.685	.041
KM20	.675	.556	-.043	.022
KM21	.562	.626	-.174	-.050
KM22	.472	.664	-.271	-.152
KM23	.546	.641	-.150	-.202
KM24	.593	.609	-.053	-.197

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 4 components extracted.

Pengelompokkan komponen maktriks dilihat berdasarkan pada nilai yang terbesar dari tiap-tiap indikator dan komponennya, antara lain:

- a) Komponen (Faktor) 1 terdiri dari: Sosialisasi BUMDes pertanyaan 1 yaitu Tahukah anda tentang BUMDes (SB1) sebesar (0,836), Sosialisasi BUMDes pertanyaan 2 yaitu Tahukah anda tentang jenis usaha BUMDes di Desa ini (SB2) sebesar (0,848), Sosialisasi BUMDes pertanyaan 3 yaitu Masyarakat desa ikut terlibat dalam kegiatan BUMDes (SB3) sebesar (0,830), Sosialisasi BUMDes pertanyaan 4 yaitu Pemerintah desa melakukan Sosialisasi BUMDes kepada masyarakat (SB4) sebesar (0,808), Sosialisasi BUMDes pertanyaan 5 yaitu BUMDes membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa (SB5) sebesar (0,811), Sosialisasi BUMDes pertanyaan 6 yaitu BUMDes menerima hasil usaha masyarakat desa untuk dikelola dan di pasarkan (SB6) sebesar (0,421), Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan 7 yaitu Tahukah anda pembentukan BUMDes di desa ini (SPB7) sebesar (0,849), Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan

8 yaitu Pemerintah desa melakukan sosialisasi pembentukan BUMDes dengan masyarakat (SPB8) sebesar (0,849), Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan 9 yaitu Tahukah tujuan dibentuknya BUMDes di desa ini (SPB9) sebesar (0,613), Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan 10 yaitu Tahukah anda Pembentukan BUMDes harus sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa (SPB10) sebesar (0,797), Peran BUMDes pertanyaan nomor 11 yaitu BUMDes dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (PB11) sebesar (0,725), Peran BUMDes pertanyaan nomor 12 yaitu BUMDes dapat meningkatkan Sumber daya manusia (SDM) (PB12) sebesar (0,802), Peran BUMDes pertanyaan nomor 13 yaitu Penyelenggara unit usaha BUMDes memberikan pelayanan yang sama kepada semua masyarakat (PB13) sebesar (0,723), Peran BUMDes pertanyaan nomor 14 yaitu Masyarakat bebas menyuarakan pendapat mengenai pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara unit usaha BUMDes (PB14) sebesar (0,657), Peran BUMDes pertanyaan nomor 16 yaitu BUMDes dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (PB16) sebesar (0,680), Peran BUMDes pertanyaan nomor 17 yaitu Penyerapan tenaga kerja semakin meningkat dengan adanya BUMDes (PB17) sebesar (0,745), Peran BUMDes pertanyaan nomor 18 yaitu BUMDes membantu pengembangan potensi desa (PB18) sebesar (0,670), Keterlibatan Masyarakat pertanyaan nomor 20 yaitu Masyarakat desa diperbolehkan terlibat dalam kegiatan BUMDes (KM20) sebesar (0,675).

- b) Komponen (Faktor) 2 terdiri dari: Keterlibatan Masyarakat pertanyaan nomor 21 yaitu BUMDes harus dikelola oleh masyarakat desa langsung (KM21) sebesar (0,626), Keterlibatan Masyarakat pertanyaan nomor 22 yaitu Masyarakat desa ikut

berpartisipasi dalam pembentukan BUMDes (KM22) sebesar (0,664), Keterlibatan Masyarakat pertanyaan nomor 23 yaitu Masyarakat desa diperbolehkan menyampaikan ide dan gagasannya untuk mengembangkan unit usaha BUMDes (KM23) sebesar (0,641), Keterlibatan Masyarakat pertanyaan 24 yaitu Pemerintah desa memberikan pelatihan tentang BUMDes kepada masyarakat desa (KM24) sebesar (0,609).

c) Komponen (Faktor) 3 terdiri dari: Peran BUMDes pertanyaan nomor 19 yaitu BUMDes sangat penting dalam pengembangan ekonomi desa (PB19) sebesar (0,685).

d) Komponen (Faktor) 4 terdiri dari: Peran BUMDes pertanyaan nomor 15 yaitu BUMDes dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup (PB15) sebesar (0,619).

Componen Matrix menunjukkan distribusi variabel yang ada dengan faktor yang terbentuk. Sedangkan angka-angka pada tabel component matrix adalah factor loading yang menunjukkan besar korelasi antara suatu variabel dengan faktor-faktor yang ada. Pada penelitian ini dilakukan rotasi dengan metode varimax dan akan dijelaskan di bawah ini:

Tabel 4.16

Component Matrix^a

Rotated Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
SB1	.855	.117	.252	.195
SB2	.879	.152	.099	.320

SB3	.873	.162	.190	.162
SB4	.799	.205	.065	.342
SB5	.818	.178	.182	.209
SB6	.509	-.115	.186	.081
SPB7	.751	.135	.430	.205
SPB8	.729	.369	.442	-.053
SPB9	.500	.158	.580	-.159
SPB10	.676	.374	.451	-.098
PB11	.475	.276	.535	.115
PB12	.457	.320	.508	.346
PB13	.201	.331	.555	.561
PB14	.220	.157	.377	.755
PB15	.220	.090	.860	.109
PB16	.337	.125	.575	.397
PB17	.659	.178	.172	.353
PB18	.454	.211	-.025	.742
PB19	.151	.199	-.007	.839
KM20	.179	.754	.270	.306
KM21	.105	.818	.199	.146
KM22	.076	.863	.105	.014
KM23	.152	.853	.056	.135
KM24	.193	.819	.051	.234

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 8 iterations.

Pada tabel diatas merupakan hasil dari proses rotasi (*Rotated Component Matrix*) dengan hasil distribusi yang lebih nyata dan lebih jelas. Pengelompokkan *Rotated Component Matrix* dilihat berdasarkan pada nilai yang terbesar dari tiap-tiap indikator dan komponennya antara lain :

a) Komponen (Faktor) 1 terdiri dari: Sosialisasi BUMDes pertanyaan nomor 1 yaitu

Tahukah anda tentang BUMDes (SB1) sebesar (0,855), : Sosialisasi BUMDes

pertanyaan nomor 2 yaitu Tahukah anda tentang jenis usaha BUMDes di Desa ini (SB2) sebesar (0,879), Sosialisasi BUMDes pertanyaan nomor 3 yaitu Masyarakat desa ikut terlibat dalam kegiatan BUMDes (SB3) sebesar (0,873), Sosialisasi BUMDes pertanyaan nomor 4 yaitu Pemerintah desa melakukan Sosialisasi BUMDes kepada masyarakat (SB4) sebesar (0,799), Sosialisasi BUMDes pertanyaan nomor 5 yaitu BUMDes membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa (SB5) sebesar (0,818), Sosialisasi BUMDes pertanyaan nomor 6 yaitu BUMDes menerima hasil usaha masyarakat desa untuk dikelola dan di pasarkan (SB6) sebesar (0,509), Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan nomor 7 yaitu Tahukah anda pembentukan BUMDes di desa ini (SPB7) sebesar (0,751), Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan nomor 8 yaitu Pemerintah desa melakukan sosialisasi pembentukan BUMDes dengan masyarakat (SPB8) sebesar (0,729), Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan nomor 9 yaitu Tahukah tujuan dibentuknya BUMDes di desa ini (SPB9) sebesar (0,500), Sosialisasi Pembentukan BUMDes pertanyaan nomor 10 yaitu Tahukah anda Pembentukan BUMDes harus sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa (SPB10) sebesar (0,676), Pembentukan BUMDes pertanyaan nomor 17 yaitu Penyerapan tenaga kerja semakin meningkat dengan adanya BUMDes (PB17) sebesar (0,659)

- b) Komponen (Faktor) 2 terdiri dari: Keterlibatan Masyarakat pertanyaan nomor 20 yaitu Masyarakat desa diperbolehkan terlibat dalam kegiatan BUMDes (KM20) sebesar (0,754), Keterlibatan Masyarakat pertanyaan nomor 21 yaitu BUMDes harus dikelola oleh masyarakat desa langsung (KM21) sebesar (0,818), Keterlibatan Masyarakat pertanyaan nomor 22 yaitu Masyarakat desa ikut

berpartisipasi dalam pembentukan BUMDes (KM22) sebesar (0,863), Keterlibatan Masyarakat pertanyaan nomor 23 yaitu Masyarakat desa diperbolehkan menyampaikan ide dan gagasannya untuk mengembangkan unit usaha BUMDes (KM23) sebesar (0,853), Keterlibatan Masyarakat pertanyaan nomor 24 yaitu Pemerintah desa memberikan pelatihan tentang BUMDes kepada masyarakat desa (KM24) sebesar (0,819)

- c) Komponen (Faktor) 3 terdiri dari: Peran BUMDes pertanyaan nomor 11 yaitu BUMDes dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (PB11) sebesar (0,535), Peran BUMDes pertanyaan nomor 12 yaitu BUMDes dapat meningkatkan Sumber daya manusia (SDM) (PB12) sebesar (0,508), Peran BUMDes pertanyaan nomor 15 yaitu BUMDes dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup (PB15) sebesar (0,860), Peran BUMDes pertanyaan nomor 16 yaitu BUMDes dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (PB16) sebesar (0,575),
- d) Komponen (Faktor) 4 terdiri dari: Peran BUMDes pertanyaan nomor 18 yaitu BUMDes membantu pengembangan potensi desa (PB18) sebesar (0,742), Peran BUMDes pertanyaan nomor 19 yaitu BUMDes sangat penting dalam pengembangan ekonomi desa (PB19) sebesar (0,839),

5. Component Transformation Matrix

Tabel 4.17

Komponen Transformasi Matrik

Component Transformation Matrix

Component	1	2	3	4
1	.712	.428	.425	.360
2	-.531	.825	-.090	.174
3	-.085	-.280	-.335	.895
4	-.453	-.241	.836	.195

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Pada data diatas, yang menunjukkan angka diatas 0,5 yaitu terdapat pada component 1 (0,712) dan component 2 (0,825). component 3 (0,335) dan component 4 (0.195). Berdasarkan hasil tersebut sudah dapat menunjukkan kalau antar component atau faktor memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan mengabaikan nilai negatif.

6. Interpretasi Faktor

Apabila sudah dibentuk pengelompokkan dan banyaknya faktor yang terbentuk dari hasil reduksi, maka penanaman faktor dapat dilakukan dengan cara melihat faktor-faktor yang sudah terbentuk dan dapat mewakili dari anggota tersebut.

Tabel 4.18

Hasil Penamaan Faktor

	INDIKATOR	% of	NAMA
--	-----------	------	------

FAKTOR		VARIANCE	FAKTOR
Faktor 1	Tahukah tentang BUMDes	11.875	Sosialisasi BUMDes, Sosialisasi Pembentukan BUMDes
	Tahukah tentang jenis BUMDes		
	Masyarakat desa ikut terlibat dalam kegiatan BUMDes		
	Pemerintah desa melakukan sosialisasi BUMDes kepada masyarakat		
	BUMDes membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa		
	BUMDes menerima hasil usaha masyarakat desa untuk dikelola dan di pasarkan		
	Pembentukan BUMDes di desa ini		
	Pemerintah desa melakukan sosialisasi pembentukan BUMDes dengan masyarakat		
	Tujuan dibentuknya BUMDes		
	Pembentukan BUMDes harus sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa		
	Penyerapan tenaga kerja semakin meningkat dengan adanya BUMDes		
Faktor 2	Masyarakat desa diperbolehkan terlibat dalam kegiatan BUMDes	2.769	Keterlibatan Masyarakat
	BUMDes harus dikelola oleh masyarakat desa langsung		
	Masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam pembentukan BUMDes		
	Masyarakat desa diperbolehkan menyampaikan ide dan gagasannya untuk mengembangkan unit usaha BUMDes		
	Pemerintah desa memberikan pelatihan tentang BUMDes kepada masyarakat desa		
Faktor 3	BUMDes dapat meningkatkan pendapatan masyarakat	1.856	Peran BUMDes
	BUMDes dapat meningkatkan Sumber daya manusia (SDM)		

	BUMDes dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup		
	BUMDes dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa		
Faktor 4	BUMDes membantu pengembangan potensi desa	1.358	Peran BUMDes
	BUMDes sangat penting dalam pengembangan ekonomi desa		

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi pedesaan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang yaitu terdiri 4 faktor.

4.3 Profil Dan Bentang Alam Dari Desa Yang Ada Di Kecamatan Beringin Dalam Melihat Potensi Ekonomi Desa

Berdasarkan dari sampel di Bab 3 sebelumnya, telah dijelaskan bahwasannya dari 11 desa yang ada di Kecamatan Beringin hanya 2 desa yang dijadikan sampel yaitu desa Sidourip dan Sidodadi Ramunia untuk melihat potensi ekonomi desa melalui profil dan bentang alam serta dapat mengukur studi kelayakkannya (*feasibility Study*).

4.3.1 Profil Desa Sidourip

A. Kondisi Geografis

Secara geografis, letak wilayah desa Sidourip sebelah barat berbatasan langsung dengan desa Aras Kabu, Desa Serdang, sebelah utara berbatasan langsung dengan desa Durian, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Aras Kabu, dan

sebelah timur berbatasan langsung dengan Bandara Kualanamu,PTPN II. Luas wilayah desa Sidourip sebesar 156 *Ha* yang terbagi atas areal pemukiman sebesar ± 81 *Ha* , areal pertanian sebesar ± 71,28 *Ha*, dan areal Daratan, sebesar ± 3,72 *Ha*. Adapun jumlah dusun di desa Sidourip terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu Dusun I-A, dusun I-B, dusun II-A, dan dusun II-B. Desa Sidourip memiliki ketinggian dari permukaan laut adalah sebesar ± 10 m, sedangkan banyaknya curah hujan di desa ini adalah sebesar ± 0,5 m/detik dan suhu udara rata-rata sebesar ± 32°C s/d 37°C.

B. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk desa Sidourip sebanyak 2237 orang yang berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1124 orang dan perempuan sebanyak 1113 orang. Jumlah kepala keluarga (KK) di desa sidourip sebanyak 658 kepala keluarga, sedangkan yang termasuk keluarga miskin sebanyak 72 kepala keluarga. Adapun jumlah penduduk menurut agama di desa sidourip terbagi 2 yaitu yang pertama adalah agama islam sebanyak 2185 orang dan kedua agama Kristen sebanyak 52 orang.

Jumlah penduduk desa Sidourip berdasarkan pekerjaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Sidourip

No	Pekerjaan	Jumlah
----	-----------	--------

1	Petani	650 orang
2	Nelayan	-
3	Pengusaha	15 orang
4	Buruh Tani	250 orang
5	Buruh Pabrik	97 orang
6	Buruh Bangunan	67 orang
7	PNS	5 orang
8	TNI/POLRI	4 orang
9	Pedagang	58 orang
10	Pengangkutan	28 orang
11	Pensiunan	16 Orang
12	Lain-lain	5 orang

Sumber : Kantor Kepala Desa Sidourip

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwasannya di desa Sidourip sumber mata pencariannya adalah petani dan yang kedua adalah buruh tani. dengan tingginya jumlah petani didesa ini maka BUMDesnya lebih mengarah ke sektor pertanian. Tetapi berdasarkan hasil wawancara singkat BUMDes yang dikembangkan di desa ini adalah BUMDes peternakan sehingga kurang efektif karena tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan masyarakat yang ada di desa Sidourip.

4.3.2 Bentang Dan Studi Kelayakkan Desa Sidourip

A. Bentang Alam Desa Sidourip

Dilihat *feasibility Study* (Studi Kelayakkan) dari kondisi geografis desa Sidourip yang sudah diterangkan sebelumnya diatas, dapat di jelaskan bahwa cuaca yang lumayan panas dan luas areal pertanian lebih besar daripada luas pemukiman sehingga dengan besarnya luas lahan areal pertanian di desa Sidourip dapat dijadikan potensi desa melalui BUMDes terutama di sektor pertanian. selain itu keberadaan infrastruktur yang mendukung desa Sidourip juga menentukan keberhasilan pembangunan, selain itu juga dapat melancarkan aktivitas masyarakat desa dalam melakukan pekerjaannya terutama di sektor pertanian. adanya pembangunan infrastruktur yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat desa. Dengan adanya Dana Desa yang disalurkan di desa ini diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi desa melalui BUMDes. Jika BUMDes disini berhasil maka desa ini layak untuk sebagai desa percontohan BUMDes di Sumatera Utara.

Peluang di desa Sidourip ini adalah memanfaatkan produk-produk kelompok PKK untuk dikembangkan melalui BUMDes. Produk kelompok PKK ini bisa menjadi kekuatan ekonomi desa. Kelemahan di desa ini adalah kurangnya sistem pemasaran sehingga tidak bisa di pasarkan secara lebih luas.

B. Bentang Sosial Budaya Desa Sidourip

Dilihat dari *Feasibility Study* (Studi Kelayakkan), Peran pemerintah desa dengan masyarakat desa merupakan faktor penentu keberhasilan desa dalam

membangun perekonomian di desa. selain itu Kelembagaan desa seperti BUMDes juga dapat menjadi wadah dan dapat membantu meningkatkan ekonomi pedesaan melalui pengembangan potensi atau usaha kecil yang dikembangkan masyarakat desa Sidourip seperti adanya setiap dusun yang memiliki kelompok PKK dengan konsep memanfaatkan limbah yang tidak terpakai menjadi barang yang memiliki nilai guna sehingga dapat di pasarkan baik itu di sekitaran desa maupun di luar desa. Semua komponen desa sidourip, baik itu masyarakat maupun pemerintah yang terlibat harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha yang dilakukan melalui BUMDes dan harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama oleh pemerintah desa dalam mengelola BUMDes yang ada di desa sidourip. Selain itu BUMDes didesa ini juga harus bersifat transparasi yaitu harus diketahui oleh seluruh masyarakat dengan mudah dan terbuka dan seluruh kegiatan BUMDes juga dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative serta harus berkelanjutan.

C. Bentang Ekonomi Desa Sidourip

Dilihat dari *Feasibility Study* (Studi Kelayakkan), desa ini mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, karena desa ini memiliki BUMDes yang bisa dikembangkan. Adanya pelatihan tentang pengelolaan BUMDes kepada masyarakat maupun pengurus BUMDes dapat meningkatkan SDM yang lebih baik lagi sehingga jika SDM di desa Sidourip ini berkembang maka masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada didesa baik itu pertanian, batu bata, produk' kelompok PKK dan lain

sebagainya menjadi nilai jual maupun nilai guna. Daya beli juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.

Kekuatan SDM dapat dijadikan peluang bagi desa untuk mengembangkan potensi desa melalui BUMDes. Selain itu kelemahannya masih banyak masyarakat desa yang pendidikannya masih rendah sehingga perlu ada pelatihan untuk BUMDes agar SDM di desa Sidourip ini lebih tinggi lagi.

D. Bentang Teknologi Desa Sidourip

Dilihat dari *Feasibility Study* (Studi Kelayakkan), adanya teknologi dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi terutama di desa Sidourip ini. Dengan adanya teknologi dapat membantu kegiatan masyarakat desa terutama bagi petani di desa ini. Adanya teknologi untuk mengolah hasil panen dari yang sedikit bisa lebih banyak dengan adanya bantuan teknologi berupa alat mesin penggilingan padi. Selain itu juga alat pertanian yang lain masih dapat dimanfaatkan petani dalam mengelola dan membantu pekerjaan petani.

Kekuatan dari adanya teknologi berupa alat-alat pertanian adalah semakin efisiennya waktu panen serta lebih banyaknya produksi yang dihasilkan daripada biasanya. Kelemahannya biaya produksi juga semakin meningkat karena adanya teknologi, selain itu ancamannya bagi petani dapat membuat penghasilan petani berkurang karena terlalu mahal biaya sewa alat-alat pertanian.

4.3.3 Profil Desa Sidodadi Ramunia

A. Kondisi Geografis

Secara geografis, letak wilayah desa Sidodadi Ramunia sebelah barat berbatasan langsung dengan desa Psr V Kebun Kelapa, Desa sebelah utara berbatasan langsung dengan desa Karang Anyar, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Emplasmen Kualanamu, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Sungai Ular. Luas wilayah desa Sidodadi Ramunia sebesar 779 *Ha* yang terbagi atas areal pemukiman sebesar $\pm 265,62$ *Ha* , areal pertanian sebesar ± 450 *Ha*, dan areal Daratan, sebesar $\pm 63,38$ *Ha*. Adapun jumlah dusun di desa Sidodadi Ramunia terdiri dari 17 dusun. Desa Sidodadi Ramunia memiliki ketinggian dari permukaan laut adalah sebesar $\pm 0 - 25$ m, sedangkan banyaknya curah hujan di desa ini adalah sebesar $\pm 0,5$ m/detik dan suhu udara rata-rata sebesar $\pm 32^{\circ}\text{C}$ s/d 37°C .

B. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk desa Sidodadi Ramunia sebanyak 12.895 orang yang berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 6708 orang dan perempuan sebanyak 6187 orang. Jumlah kepala keluarga (KK) di desa Sidodadi Ramunia sebanyak 3355 kepala keluarga, sedangkan yang termasuk keluarga miskin sebanyak 159 kepala keluarga. Adapun jumlah penduduk menurut agama di desa sidourip terbagi 2 yaitu yang pertama adalah agama islam sebanyak 12.501 orang dan kedua agama Kristen sebanyak 27 orang.

Jumlah penduduk desa Sidodadi Ramunia berdasarkan pekerjaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Sidodadi Ramunia

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.665 orang
2	Nelayan	-
3	Buruh Tani	960 orang
4	Buruh Pabrik	570 orang
5	Pegawai Swasta	350 orang
6	PNS	112 orang
7	TNI/POLRI	4 orang
8	Pedagang	520 orang
9	Lain-lain	5.235 orang

Sumber : Kantor Kepala Desa Sidodadi Ramuni, 2019

4.3.4 Bentang Dan Studi Kelayakkan Desa Sidodadi Ramunia

A. Bentang Alam Desa

Dilihat *feasibility Study* (Studi Kelayakkan) dari kondisi geografis desa Sidodadi Ramunia yang sudah diterangkan sebelumnya diatas, dapat di jelaskan bahwa cuaca yang lumayan panas dan jumlah penduduk desa ini lebih banyak mata pencariannya adalah petani. Letak desa juga sangat strategis ditengah desa yang ada di kecamatan Beringin sehingga potensi untuk mengembangkan usaha masyarakat

desa sangatlah efektif, selain itu juga luas lahan pertanian di desa Sidodadi Ramunia ini sangat kecil. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk memanfaatkan lahan pertanian yang kecil sehingga dapat diolah menjadi sumber potensi desa Sidodadi Ramunia.

Salah satu peluang dalam memanfaatkan lahan pertanian yang kecil ini adalah dengan memanfaatkan BUMDes sebagai wadah dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa terutama di bidang pertanian. Selain itu juga lahan yang pertanian yang tidak digunakan atau masih ada lahan yang kosong dapat di jadikan sebagai tempat pariwisata berbasis edukasi dengan letak desa yang dekat dengan bandara Kualanamu sangatlah efektif. Dengan adanya BUMDes dapat sebagai kekuatan ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa tetapi kelemahannya jika hanya memafaatkan BUMDes sebagai wadah pengembangan ekonomi di sektor pertanian masih belum bisa dipastikan keberhasilannya.

B. Bentang Sosial Budaya

Dilihat dari *Feasibility Study* (Studi Kelayakkan), Desa Sidodadi Ramunia memiliki penduduk yang lumayan banyak dari desa lainnya yang ada di Kecamatan Beringin sehingga desa ini seharusnya akan lebih mudah dalam mengembangkan potensi desa melalui produk barang atau jasa yang dihasilkan masyarakat setempat. Produk barang dan jasa yang dihasilkan dapat dipasarkan di sekitaran desa sebagai salah satu karakteristik lokal desa. Dengan adanya BUMDes, karakteristik lokal ini dapat dikembangkan.

C. Bentang Ekonomi

Dilihat dari *Feasibility Study* (Studi Kelayakkan), Desa Sidodadi Ramunia memiliki penduduk yang lumayan banyak dari desa yang ada di Kecamatan Beringin, banyaknya penduduk menjelaskan bahwa banyaknya kegiatan yang ada di desa, seperti membuka usaha atau berdagang merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya peran BUMDes bisa sebagai wadah bagi masyarakat untuk menambah modal dan meningkatkan SDM serta masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan BUMDes sehingga adanya BUMDes diharapkan mampu membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi karena penduduk desa Sidodadi lumayan banyak sehingga ekonomi masyarakat desa juga bisa meningkat.

D. Bentang Teknologi

Dilihat dari *Feasibility Study* (Studi Kelayakkan), adanya teknologi dapat membantu masyarakat desa Sidodadi lebih mudah dalam mengembangkan potensi desa. teknologi juga bisa digunakan sebagai alat pengolahan terutama di sektor pertanian. Dengan adanya teknologi yang canggih para petani tidak jauh berjalan kaki lagi untuk mengolah hasil panen karena sudah ada teknologi pertanian berupa alat-alat pertanian yang dikembangkan melalui BUMDes. Dengan adanya alat-alat pertanian yang ada di BUMDes, masyarakat dapat menyewa ataupun meminjam alat tersebut untuk meningkatkan produksi hasil panen padi lebih banyak lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dan APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta pelayanan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan membangun perekonomian Indonesia dari pinggiran, salah satunya dengan pemanfaatan BUMDes.
2. Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa belum tepat dan belum berjalan lancar dalam membangun perekonomian desa di Kecamatan Beringin terutama membangun potensi desa melalui BUMDes, hal ini dibuktikan dengan banyaknya BUMDes yang sudah tidak berjalan lagi di beberapa desa.
3. Hasil pengujian analisa faktor menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang BUMDes. Hal ini dibuktikan dari pernyataan variabel sosialisasi BUMDes, Sosialisasi Pembentukan BUMDes, Peran BUMDes dan Keterlibatan Masyarakat dengan BUMDes. Kurangnya

sosialisasi, pembentukan, serta peran BUMDes dan keterlibatan masyarakat dengan BUMDes adalah salah satu permasalahan yang ada di desa Se Kecamatan Beringin.

4. Berdasarkan *Feasibility Study* (Studi Kelayakkan), dilihat dari bentang alam (geografisnya), bentang sosial dan budaya, bentang ekonomi dan bentang teknologinya di desa Se Kecamatan Beringin memiliki Potensi yang baik hanya kurangnya pengelolaan potensi itu melalui BUMDes.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti mencoba member beberapa saran kepada elemen- elemen yang tertarik pada penelitian ini. Adapun saran- saran yang dapat peneliti berikan pada skripsi ini adalah:

5.2.1 Bagi Dunia Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, yaitu pengaruh kebijakan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi pedesaan.

5.2.1 Bagi Desa Di Kecamatan Beringin

Dengan adanya penelitian ini seluruh desa di Kecamatan Beringin dapat lebih mengembangkan BUMDes yang sudah dan di bentuk maupun baru yang dibentuk serta yang belum dibentuk segera dibentuk dan juga BUMDes sebagai salah satu penunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *JDEB*, 68-70.
- Arsyad, L. (2005). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFU-UGM.
- Azwardi, & Abukosim. (2007). Pengelolaan Keuangan Pedesaan Dalam Mendorong Pembangunan Wilayah Pedesaan: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5.
- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Buku Pintar Dana Desa. (2017). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Deininger, K., & Pedro, O. (2000). Asset Distribution, Inequality, and Growth. . *The World Bank*, (pp. 5-9).
- Fitri Ramdhani Harahap, S. M. (2015). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. *Jurnal Society*, 36.
- Gilarso, T. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Pengantar Makro (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. (2018). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 <http://www.kemenkeu.go.id>. (Diakses pada 7 Desember 2018).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia* . (2015). Dana Desa Tahun 2015-2018. <http://www.kemenkeu.go.id> (Diakses pada 7 Desember 2018).
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*.

- Kemendesa. (2016). Retrieved 2018, from Data Desa, Data Daerah Tertinggal dan Tertentu, Data Transmigrasi.: <http://www.kemendesa.go.id> (Diakses pada 10 Desember 2018).
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan (edisi pertama)*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis (edisi keempat)*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2015). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, D. (2009). Kemiskinan di Indonesia dan Solusinya. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, Volume 5*, 1-19.
- Mangkoesoebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, G. N. (2007). *Macroeconomics*. Jakarta: Erlangga.
- Musgrave, R. A., & Peggy, B. (1993). *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek (edisi kelima)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ngoyo, M. F. (2015). Mengawal Sustainable Development Goals(SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Sosioireligius* , 78.
- Pratama, R. (2008). *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rochjadi, A. (2004). *Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah InterGovermental Fiscal Review*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Sanusi, B. (2004). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukirno, S. (1981). *Ekonomi Pembangunan*. Medan: Borta Gorat.
- Sukirno, S. (2004). *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Dasar Kebijakan (edisi kedua)* . Jakarta: Kencana Persada Group.
- Sulistiowati, R. (n.d.). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga Dan Pengaruhnya Terhadap*.

- Suprayitno, B. (2017). *Ekonomi Publik Konsep dan Implementasi Kebijakan (edisi 1)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Suryanto, R. (2018). *Peta Jalan BUMDES sukses*. Yogyakarta: Penerbit PT Syncore Indonesia.
- Suyanto. (2009). Studi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia (a study on the policy of decentralization in Indonesia). *Jurnal ekonomi, Manajemen dan Bisnis, Volume 1*, 66-81.
- Todaro, P. M., & Smith, C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi Kesebelas)*. Jakarta: Erlangga.

LAMPIRAN DAN HASIL DATA KUESIONER

Uji Validitas

No Item		Jumlah	Keterangan
SB1	Pearson Correlation	.329*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.027	
	N	45	
SB2	Pearson Correlation	.364*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.014	
	N	45	
SB3	Pearson Correlation	0.359*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.016	
	N	45	
SB4	Pearson Correlation	0.388*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.016	
	N	45	
SB5	Pearson Correlation	.365*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.014	
	N	45	
SB6	Pearson Correlation	0.055	Tidak Valid
	Sig. (2-tailed)	0.722	
	N	45	
SPB7	Pearson Correlation	.355*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.017	
	N	45	
SPB8	Pearson Correlation	.523*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	45	
SPB9	Pearson Correlation	.288	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.055	
	N	45	
SPB10	Pearson Correlation	.512**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	45	
PB11	Pearson Correlation	.445**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.002	
	N	45	
PB12	Pearson Correlation	.516**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	45	
PB13	Pearson Correlation	.540**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	45	

PB14	Pearson Correlation	.387**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.009	
	N	45	
PB15	Pearson Correlation	0.289	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.054	
	N	45	
PB16	Pearson Correlation	.356*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.016	
	N	45	
PB17	Pearson Correlation	.371*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.012	
	N	45	
PB18	Pearson Correlation	.410**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.005	
	N	45	
PB19	Pearson Correlation	.367*	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.013	
	N	45	
KM20	Pearson Correlation	.867**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	45	
KM21	Pearson Correlation	.870**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	45	
KM22	Pearson Correlation	.869**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	87	
KM23	Pearson Correlation	.861**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	45	
KM24	Pearson Correlation	.840**	Valid
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	87	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.953	24

KMO and Bartlett's Test

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.808
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1097.734
	Df	276
	Sig.	.000

Uji MSA (*Measure of Sampling Adequacy*)

No.	Variabel	Nilai <i>Measure of Sampling Adequacy</i> (MSA)
1	SB1	.823 ^a
2	SB2	.802 ^a
3	SB3	.881 ^a
4	SB4	.846 ^a
5	SB5	.835 ^a
6	SB6	.850 ^a
7	SPB7	.879 ^a
8	SPB8	.917 ^a
9	SPB9	.784 ^a
10	SPB10	.886 ^a
11	PB11	.773 ^a
12	PB12	.908 ^a
13	PB13	.862 ^a
14	PB14	.781 ^a
15	PB15	.752 ^a
16	PB16	.683 ^a
17	PB17	.767 ^a
18	PB18	.756 ^a
19	PB19	.751 ^a
20	KM20	.762 ^a

21	KM21	.856 ^a
22	KM22	.727 ^a
23	KM23	.661 ^a
24	KM24	.689 ^a

Uji Communalitas

Communalities

	Initial	Extraction
SB1	1.000	.847
SB2	1.000	.907
SB3	1.000	.851
SB4	1.000	.803
SB5	1.000	.777
SB6	1.000	.314
SPB7	1.000	.809
SPB8	1.000	.866
SPB9	1.000	.637
SPB10	1.000	.809
PB11	1.000	.601
PB12	1.000	.688
PB13	1.000	.772
PB14	1.000	.786
PB15	1.000	.808
PB16	1.000	.617
PB17	1.000	.620
PB18	1.000	.801
PB19	1.000	.765
KM20	1.000	.768
KM21	1.000	.741
KM22	1.000	.761
KM23	1.000	.772
KM24	1.000	.765

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Total Variance Explained

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	11.875	49.480	49.480	11.875	49.480	49.480	7.092	29.552	29.552
2	2.796	11.651	61.131	2.796	11.651	61.131	4.301	17.921	47.473
3	1.856	7.733	68.864	1.856	7.733	68.864	3.325	13.852	61.325
4	1.358	5.658	74.523	1.358	5.658	74.523	3.167	13.198	74.523
5	.957	3.987	78.510						
6	.880	3.667	82.176						
7	.822	3.426	85.602						
8	.660	2.749	88.351						
9	.538	2.242	90.594						
10	.457	1.906	92.499						
11	.326	1.358	93.858						
12	.250	1.042	94.900						
13	.213	.889	95.788						
14	.208	.866	96.654						
15	.172	.718	97.373						
16	.162	.676	98.049						
17	.125	.523	98.572						
18	.095	.397	98.968						
19	.074	.308	99.277						
20	.055	.230	99.507						
21	.043	.180	99.686						
22	.032	.135	99.821						
23	.027	.113	99.934						
24	.016	.066	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Faktor Loading

Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
SB1	.836	-.346	-.016	-.167
SB2	.848	-.294	.136	-.289
SB3	.830	-.319	-.038	-.244
SB4	.808	-.202	.160	-.290
SB5	.811	-.267	.007	-.221
SB6	.421	-.368	-.001	-.031
SPB7	.849	-.290	-.062	.027
SPB8	.846	-.132	-.361	-.060
SPB9	.613	-.215	-.423	.190
SPB10	.797	-.108	-.401	-.038
PB11	.725	-.053	-.194	.188
PB12	.802	.036	.011	.208
PB13	.723	.215	.206	.402
PB14	.657	.111	.487	.324
PB15	.599	-.100	-.235	.619
PB16	.680	-.058	.099	.375
PB17	.745	-.157	.153	-.129
PB18	.670	.065	.575	-.133
PB19	.492	.231	.685	.041
KM20	.675	.556	-.043	.022
KM21	.562	.626	-.174	-.050
KM22	.472	.664	-.271	-.152
KM23	.546	.641	-.150	-.202
KM24	.593	.609	-.053	-.197

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 4 components extracted.

Component Matrix^a

Rotated Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
SB1	.855	.117	.252	.195
SB2	.879	.152	.099	.320
SB3	.873	.162	.190	.162
SB4	.799	.205	.065	.342
SB5	.818	.178	.182	.209
SB6	.509	-.115	.186	.081
SPB7	.751	.135	.430	.205
SPB8	.729	.369	.442	-.053
SPB9	.500	.158	.580	-.159
SPB10	.676	.374	.451	-.098
PB11	.475	.276	.535	.115
PB12	.457	.320	.508	.346
PB13	.201	.331	.555	.561
PB14	.220	.157	.377	.755
PB15	.220	.090	.860	.109
PB16	.337	.125	.575	.397
PB17	.659	.178	.172	.353
PB18	.454	.211	-.025	.742
PB19	.151	.199	-.007	.839
KM20	.179	.754	.270	.306
KM21	.105	.818	.199	.146
KM22	.076	.863	.105	.014
KM23	.152	.853	.056	.135
KM24	.193	.819	.051	.234

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 8 iterations.

Komponen Transformasi Matrik

Component Transformation Matrix

Component	1	2	3	4
1	.712	.428	.425	.360
2	-.531	.825	-.090	.174
3	-.085	-.280	-.335	.895
4	-.453	-.241	.836	.195

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Hasil Penamaan Faktor

FAKTOR	INDIKATOR	% of VARIANCE	NAMA FAKTOR
Faktor 1	Tahukah tentang BUMDes	11.875	Sosialisasi BUMDes, Sosialisasi Pembentukan BUMDes
	Tahukah tentang jenis BUMDes		
	Masyarakat desa ikut terlibat dalam kegiatan BUMDes		
	Pemerintah desa melakukan sosialisasi BUMDes kepada masyarakat		
	BUMDes membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa		
	BUMDes menerima hasil usaha masyarakat desa untuk dikelola dan di pasarkan		
	Pembentukan BUMDes di desa ini		
	Pemerintah desa melakukan sosialisasi pembentukan BUMDes dengan masyarakat		
	Tujuan dibentuknya BUMDes		

	Pembentukan BUMDes harus sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa		
	Penyerapan tenaga kerja semakin meningkat dengan adanya BUMDes		
Faktor 2	Masyarakat desa diperbolehkan terlibat dalam kegiatan BUMDes	2.769	Keterlibatan Masyarakat
	BUMDes harus dikelola oleh masyarakat desa langsung		
	Masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam pembentukan BUMDes		
	Masyarakat desa diperbolehkan menyampaikan ide dan gagasannya untuk mengembangkan unit usaha BUMDes		
	Pemerintah desa memberikan pelatihan tentang BUMDes kepada masyarakat desa		
Faktor 3	BUMDes dapat meningkatkan pendapatan masyarakat	1.856	Peran BUMDes
	BUMDes dapat meningkatkan Sumber daya manusia (SDM)		
	BUMDes dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup		
	BUMDes dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa		
Faktor 4	BUMDes membantu pengembangan potensi desa	1.358	Peran BUMDes
	BUMDes sangat penting dalam pengembangan ekonomi desa		

Hari/tanggal	
No. urut kuesioner	

KUESIONER PENELITIAN

“PENGARUH KEBIJAKAN BUMDES TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DI KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG”

Terima kasih atas partisipasi Anda untuk menjadi salah satu responden dalam pengisian kuesioner ini merupakan instrument penelitian yang dilakukan oleh :

Peneliti : DICKY PRASETYO

NPM : 1505180022

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Untuk memenuhi tugas penyelesaian Skripsi Program Sarjana, saya harap Anda menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua sesuai dengan kode etik penelitian. Penelitian menjamin kerahasiaan semua data. Ketersediaan anda dalam mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang tak ternilai bagi saya. Akhir kata saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya.

Bagian I : Identitas Responden

Petunjuk Pengisian:

Pilih salah satu jawaban pada setiap pertanyaan dengan memberikan tanda silang (X).

Nama :

Alamat :

1. Jenis kelamin : L / P
2. Usia
 - a. 17-30 tahun
 - b. 31-40 tahun
 - c. 41-50 tahun
 - d. 51-70 tahun
3. Pendidikan Terakhir
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMA
 - d. >SMA
4. Jenis pekerjaan
 - a. PNS
 - b. Pegawai/karyawan swasta
 - c. Wiraswasta (Pedagang, dll)
 - d. Buruh
 - e. Petani
 - f. Lainnya
5. Penghasilan tiap bulan
 - a. <Rp 500 ribu
 - b. Rp 500 ribu - Rp 1 juta
 - c. Rp. 1 juta - Rp 2 juta
 - d. Rp >Rp 2 juta
6. Tempat tinggal (Rumah)
 - a. Sewa Rumah
 - b. Rumah sendiri
 - c. Rumah Keluarga

Bagian II : SOSIALISASI BUMDES

Pilih alternatif jawaban yang paling sesuai menurut Anda dan berikan tanda centang (√).

1. STS = Sangat Tidak Mengetahui
2. TS = Tidak Mengetahui
3. S = Mengetahui
4. SS = Sangat Mengetahui

A. SOSIALISASI BUMDES

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		1	2	3	4
1	Tahukah anda tentang BUMDes				

2	Tahukah anda tentang jenis usaha BUMDes di Desa ini				
3	Masyarakat desa ikut terlibat dalam kegiatan BUMDes				
4	Pemerintah desa melakukan Sosialisasi BUMDes kepada masyarakat				
5	BUMDes membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa				
6	BUMDes menerima hasil usaha masyarakat desa untuk dikelola dan di pasarkan				

B. SOSIALISASI PEMBENTUKAN BUMDES

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		1	2	3	4
7	Tahukah anda pembentukan BUMDes di desa ini				
8	Pemerintah desa melakukan sosialisasi pembentukan BUMDes dengan masyarakat				
9	Tahukah tujuan dibentuknya BUMDes di desa ini				
10	Tahukah anda Pembentukan BUMDes harus sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa				

Bagian III : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pilih alternatif jawaban yang paling sesuai menurut Anda dan berikan tanda centang (✓).

- 1. STS = Sangat Tidak Setuju
- 2. TS = Tidak Setuju
- 3. S = Setuju
- 4. SS = Sangat Setuju

A. PERANAN BUMDES

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		1	2	3	4
11	BUMDes dapat meningkatkan pendapatan masyarakat				
12	BUMDes dapat meningkatkan Sumber daya manusia (SDM)				
13	Penyelenggara unit usaha BUMDes memberikan pelayanan yang sama kepada semua masyarakat				
14	Masyarakat bebas menyuarakan pendapat mengenai pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara unit usaha BUMDes				
15	BUMDes dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup				

16	BUMDes dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa				
17	Penyerapan tenaga kerja semakin meningkat dengan adanya BUMDes				
18	BUMDes membantu pengembangan potensi desa				
19	BUMDes sangat penting dalam pengembangan ekonomi desa				

B. Keterlibatan Masyarakat

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		1	2	3	4
20	Masyarakat desa diperbolehkan terlibat dalam kegiatan BUMDes				
21	BUMDes harus dikelola oleh masyarakat desa langsung				
22	Masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam pembentukan BUMDes				
23	Masyarakat desa diperbolehkan menyampaikan ide dan gagasannya untuk mengembangkan unit usaha BUMDes				
24	Pemerintah desa memberikan pelatihan tentang BUMDes kepada masyarakat desa				



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : DICKY PRASETYO
NPM : 1505180022
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : PENGARUH KEBIJAKAN BUMDES TERHADAP
PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DI KECAMATAN
BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
16/2-2019	Bab IV hrs di awal dan kand. Geografi 4/1 kab. Ds dan Kec. Beringin dan Dasa. Sampel.		
21/2-2019	Buat analisis di mtl Studi Kelayakan Bisnis. 4/2 Dasa		
21/2-2019	Data kab. - kec dan Dasa di Bab IV tambahkan 4/ bag. kandi. Demografi - sossek dan Dana Desa y ditans		
4/3-2019	Memukan data Prosl Dasa di Bab IV y mutakhir nmen masalah. J. dan		
4/3-2019	EDP 4/ record Dan dr Persepsi May. Petani Dasa.		
16/3-2019	All in sblh dicantumkan dan muin 4/ Bab IV Acc 4/ di Ujikan		

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Medan, Maret 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Dicky Prasetyo
NPM : 1505180022
Konsentrasi : -
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

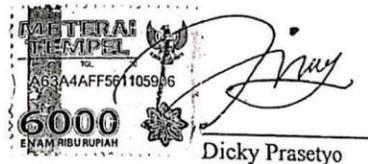
Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan...31-01...2019

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 32/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/8/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 8/11/2018

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dicky Prasetyo
NPM : 1505180022
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : -

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : -

Rencana Judul : 1. Pengaruh kebijakan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi pedesaan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang
2. -
3. -

Objek/Lokasi Penelitian : Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Dicky Prasetyo)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

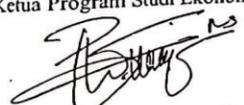
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 32/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/8/11/2018

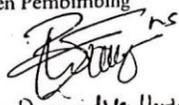
Nama Mahasiswa : Dicky Prasetyo
NPM : 1505180022
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : -
Tanggal Pengajuan Judul : 8/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor, atau;
Alternatif judul lainnya.....
..... (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Nama Dosen pembimbing : Prawidya Hariani, M. (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing :
..... (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan


(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 3 Desember 2018

Dosen Pembimbing


(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si)